

**DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA DI
KAWASAN PASIFIK SELATAN TERKAIT ORGANISASI PAPUA
MERDEKA
SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka SKRIPSI

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji:

1. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub,Int., M.A.
3. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A

Tanda Tangan

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dimas Hutomo Sahanda
No. Mahasiswa : 14323016
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Di
Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Desember 2020

Yang menyatakan

Dimas Hutomo Sahanda



HALAMAN MOTO

Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, sebuah kutipan tersebut selalu membuat saya yakin dengan apa yang selalu saya lakukan. Asal dengan tujuan yang positif pasti akan berjalan dengan baik, tidak perlu harus berpatokan dengan orang lain, apa yang kita ingini, apa yang kita suka, apa yang kita mau, jalani saja, jangan pernah takut dengan penilaian orang lain, jadikan itu sebagai kritik yang membangun, karena hidup cuma sekali dan kita yang menjalani bukan orang lain.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa salam*, keluarga, sahabat beserta pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nahori, S.Psi., M.A.g selaku Dekan Fakultas Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int St., M.A selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat untuk segala kebingungan dan kegundahan selama menjalani kuliah. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan melindungi Bapak beserta keluarga.
3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang mana telah memberikan begitu banyak nasehat, dukungan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering melakukan kesalahan serta kekhilafan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah S.W.T.
4. Ibu Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A selaku Dosen Penguji Skripsi terima kasih untuk segala saran dan masukan yang telah Ibu berikan. Semoga Allah senantiasa melindungi Ibu dan membalas kebaikan Ibu

dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang lebih mulia.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti.
7. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat-surat kebutuhan penelitian, serta memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua orangtua tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan nasehat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Adik-adik tersayang yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman – teman yang selama ini telah menemani di Jogja dan sudah menjadi teman seperjuangan, kepada yang saya cintai, Jordi Haus Ramado, Mamita, Dino, Vannie, Rio Purbaya, Hanif, Dhafin, Ocacola, Kaniraras, Cici Priskilla, Rizky Mesias, Ridwan Handoko, Athar Al Ikhwan, Firzha Ananda, Dina Alia, Diwa Hutomo, Dini Hamzah, Savira June, Andre, Ravi Zahrina, Panji, Dayat, Bayu, Bagir, Ariandi, Kiki Uteq, teman-teman KKN dan lain-lain yang saya tidak bisa ucapkan satu persatu.
11. Terima kasih kepada kantor saya yang telah menjadi saksi perjuangan saya dalam mencapai gelar S1, banyak pelajaran hidup yang telah diberikan disini yang tentu saja membentuk saya hingga saat ini, tidak mudah berkerja sambil kuliah namun Alhamdulillah semuanya bisa dilewati.
12. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama ini, semoga apa yang kalian impikan dan harapkan dikabulkan oleh Allah SWT.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan baik yang disebutkan namanya maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan penelitian yang baru dan inovatif.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Dimas Hutomo Sahanda

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi	6
E. Cakupan Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Landasan Konseptual	9

H. Metode Penelitian.....	13
BAB II HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN TERKAIT OPM	16
A. Posisi Negara-Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Terkait OPM	16
1. Pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)	18
a. Vanuatu.....	18
b. Kepulauan Solomon	19
c. Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis	21
2. Pendukung NKRI	23
a. Fiji.....	23
b. Papua Nugini	24
B. Respon Indonesia Terkait Isu OPM.....	25
1. Indonesia dalam <i>Melanesian Sparhead Group</i> (MSG)	26
2. Indonesia dalam <i>Pacific Islands Forum</i> (PIF)	30
3. Indonesia dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)	33
4. Pendekatan Bilateral Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan	35
BAB III STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA KAWASAN ASIA PASIFIK SELATAN	39
A. Manajemen Berita	39
B. Komunikasi Strategis	45
1. <i>Melanesian Culture Festival</i>	46
2. <i>Bali Democracy Forum</i>	51
C. Membangun Relasi.....	55
1. Pemberian Beasiswa.....	56
a. Darmasiswa dan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	57
b. Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia	62

2. Kerjasama Teknis.....	67
D. Tujuan Strategi Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara- Negara Kawasan Asia Pasifik Selatan	72
BAB IV KESIMPULAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kehadiran Anggota MSG dalam BDF (2014-2019)	52
Tabel 3.2 Peserta BSBI dari Indonesia	65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Kawasan Pasifik Selatan	17



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Tingkat Partisipasi Anggota MSG Dalam Darmasiswa Selama 5 Tahun Terakhir (2015-2020).....	58
Grafik 3.2 Tingkat Partisipasi Kepulauan Pasifik dalam BSBI (2003-2019).....	64



DAFTAR SINGKATAN

BDF	: <i>Bali Democracy Forum</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSBI	: Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia
FLNKS	: Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis
FPMMI	: Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia
GNB	: Gerakan Non-Blok
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPWP	: <i>Internasional Parliamentarians for West Papua</i>
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KNB	: Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang
KSST	: Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUAI	: Kuasa Usaha Ad-Interim
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MACFEST	: <i>Melanesian Arts & Cultural Festival</i>
MSG	: <i>Melanesian Sparehead Group</i>
NFRPB	: Negara Federasi Republik Papua Barat
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPM	: Organisasi Papua Merdeka

PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
Pepera	: Penentuan Pendapat Rakyat
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PIANGO	: <i>Pacific Islands Association of Non-Governmental Organizations</i>
PIDF	: <i>Pacific Islands Development Forum</i>
PIF	: <i>Pacific Islands Forum</i>
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PLBN	: Pos Lintas Batas Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDG	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SwPD	: <i>Southwest Pacific Dialogue</i>
ULMWP	: <i>United Liberation Movement for West Papua</i>
WPNCCL	: <i>West Papua National Coalition for Liberation</i>
WPNP	: <i>West Papua National Parliament</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sampai saat ini masih terus menuntut haknya untuk merdeka dan lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia, terhitung sejak tahun 1965 Organisasi ini terbentuk, masih banyak sekali ancaman – ancaman yang dilakukan, terlebih terhadap para pekerja perusahaan pertambangan *Freeport Indonesia*. OPM sendiri didirikan untuk menentang penguasaan Indonesia terhadap Papua yang dinilai kebijakan dari pemerintah kurang memuaskan sebagian masyarakat Papua (Wospakrik, 2018, p. 1), namun bukan hanya menentang beberapa kebijakan pemerintah Indonesia saja, OPM juga menuntut permasalahan ketimpangan politik dan beberapa isu HAM di Papua. OPM merupakan salah satu bentuk dari penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Soekarno. OPM sebagai gerakan yang berada di bagian wilayah Indonesia ini menjadi topik perdebatan alot bagi petinggi negara Indonesia, pasalnya wilayah Papua sendiri memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. SDA yang terdapat di wilayah Papua menjadi sebuah daya tarik yang tinggi bagi negara Indonesia untuk keberlangsungan hidup warga negara. OPM berdiri dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1963. OPM

melancarkan perlawanan bersenjata pada 26 Juli 1965 di Manokwari (Amindoni, 2018). Hingga saat ini perlawanan yang dilakukan oleh OPM masih gencar ditujukan bagi pemerintah Indonesia.

Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, wilayah Papua sendiri menjadi sumber pemasukan yang besar bagi negara. Tugas bagi pemerintah Indonesia ialah melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat Papua pada umumnya dan OPM pada khususnya. Diplomasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi suatu hal yang penting untuk mempertahankan wilayah Papua. Selain pentingnya pendekatan terhadap masyarakat Papua, perwujudan kesetaraan sosial juga tidak kalah penting. Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah pintu masuk untuk penyelesaian masalah sosial yang ada antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia (Amindoni, 2018). OPM sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok politik dan kelompok militer. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok politik OPM dilakukan di luar negeri, sedangkan kegiatan kelompok militer itu sendiri dilakukan di Papua. Sumber pendanaan kegiatan-kegiatan OPM tersebut berasal dari negara-negara Barat. Sehingga OPM memiliki kekuatan yang besar dalam melancarkan penolakan terhadap pemerintah Indonesia (Djopari, 2015, p. 5). Kegiatan OPM di luar negeri pada perkembangannya mampu menarik beberapa entitas Internasional, beberapa negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan mendukung keberadaan OPM salah satunya adalah Vanuatu yang sering sekali mendorong isu OPM di forum internasional.

Vanuatu merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan yang menjadi salah satu negara paling vokal dan tegas menyatakan dukungannya terhadap OPM (Sabir, 2018, p. 95). Kepentingan Vanuatu di Papua didasari oleh hubungan etnis yang cukup erat, yaitu *Melanesian Connection* secara antropologi. Kedekatan etnis tersebut menyebabkan Vanuatu mendukung penuh gerakan separatis Papua untuk mencapai kemerdekaannya. OPM melaksanakan sebuah Kongres Rakyat Papua II untuk mencapai gagasan menginternasionalisasi Papua dengan cara melobi masyarakat internasional. OPM meminta bantuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan kaitannya sebagai penjaga ketertiban dunia, guna memberikan keamanan terhadap Papua sampai terbentuk pemerintahan yang tetap (Elisabeth, 2016, p. 45). OPM dan gerakan pendukung kemerdekaan Papua melakukan lobi internasional dengan cara bilateral antarnegara di forum regional atau internasional dan dengan *Non-Government Organization* (NGO). Hasilnya adalah beberapa negara di Pasifik Selatan secara tegas mendukung perjuangan OPM dalam meraih kemerdekaan.

Pada tahun 2017 sekelompok pemuda Papua berunjuk rasa di Jakarta dengan tuntutan agar pemerintah Indonesia menggelar referendum di Papua. Hal tersebut dirasa penting bagi masyarakat Papua, pasalnya pemerataan sosial maupun ekonomi di Papua masih belum terealisasikan. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia (Utama, 2017). Dibalik dari beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan sebagian

masyarakat Papua dan panasnya gerakan Organisasi Papua Merdeka, hal tersebut diyakini bisa terjadi karena adanya dukungan Internasional terhadap organisasi tersebut. Selain Vanuatu negara yang paling vokal dalam memberikan dukungan terhadap OPM, dukungan Internasional lain yang berasal dari negara – negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan, salah satunya adalah Selandia Baru. Adanya dukungan pada tahun 2016 terhadap Organisasi Papua Merdeka oleh Selandia Baru melalui 11 perwakilan anggota parlemen yang terdiri dari 4 partai yakni, Partai Hijau, Partai Buruh, Partai Nasional dan Partai Maori. Kesebelas perwakilan tersebut menandatangani Deklarasi Westminster yang diusulkan pada saat *Internasional Parliamentarians for West Papua* (IPWP) di Inggris pada tahun 2016 silam (Hasan A. M., 2017).

Disisi lain Vanuatu memberikan dukungan terhadap perjuangan kelompok separatis Papua, yaitu pada sidang Majelis Umum PBB ke-71 tahun 2016, Vanuatu bersama lima negara Pasifik lainnya juga menyinggung masalah yang sama. Mereka bahkan mendesak PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Papua (Indonesia, 2019). Pada tahun 2019 Vanuatu mengikutkan salah satu tokoh Papua Merdeka yakni Benny Wenda yang dimasukkan sebagai peserta Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu pada tanggal 13 – 16 Agustus 2019, Dimasukkannya Benny Wenda ke dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) oleh Vanuatu adalah sebagai dukungan dengan maksud agar Benny Wenda bisa menggunakan forum tersebut untuk mendesak PBB agar bisa menggelar referendum kemerdekaan Papua.

Dukungan internasional diperlukan untuk mencapai kepentingan politik OPM, yakni ingin memisahkan diri dari Indonesia. Tuntutan politik merdeka yang ingin dicapai oleh OPM tersebut diberi label oleh pemerintah Indonesia sebagai gerakan separatis Papua. Dengan demikian, agar bisa mencegah aksi yang dilakukan oleh OPM, Indonesia harus melakukan diplomasi terhadap gerakan separatis tersebut dan saat ini Indonesia semakin gencar mendekati diri pada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai upaya menekan dukungan bagi kelompok OPM. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia sendiri salah satunya adalah melalui kebijakan diplomasi publik yang menasar ke negara-negara di kawasan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan pada analisis implementasi diplomasi publik yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara yang berada di kepulauan Pasifik terkait dengan isu OPM (Ibrahim, 2019).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan terkait dengan OPM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Indonesia dalam pendekatan dengan negara-negara yang ada di kepulauan Pasifik terkait OPM.

D. Signifikansi

Penelitian ini dianggap penting karena akan meneliti strategi yang di ambil oleh Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara yang ada di kepulauan Pasifik terkait OPM. Strategi seperti apa saja yang diambil oleh Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara yang ada di kepulauan Pasifik terkait dukungan terhadap OPM. Mengingat dukungan penuh yang diberikan oleh negara-negara di kepulauan Pasifik terhadap OPM dan perlu ada upaya Indonesia untuk meredam dukungan bagi kelompok tersebut.

E. Cakupan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini diambil jangkauan penelitian tentang strategi yang diambil oleh Indonesia untuk meredam dukungan negara-negara di kepulauan Pasifik terkait OPM dari tahun 2014 sampai 2019. Pada penelitian ini juga difokuskan terhadap negara-negara di kawasan Melanesia di Asia Pasifik Selatan khususnya Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, Papua Nugini dan aktor non-negara *Kanak Socialist Liberation Front* (FLKNS). Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut merupakan target sasaran dalam mencari dukungan oleh OPM dengan menggunakan taktik solidaritas dan persaudaraan ras Melanesia.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sabir, dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang diplomasi publik yang dilakukan Indonesia terhadap negara luar yang mendukung OPM sebagai upaya penyelesaian isu separatisme di Papua. Dalam jurnal tersebut Ahmad Sabir menjelaskan mengenai tiga faktor utama yang menyebabkan diplomasi publik yang dilakukan Indonesia, yaitu: (1) pelaksanaan diplomasi publik Indonesia yang masih didominasi aktor negara dan kurang melibatkan aktor non-negara; (2) tidak optimalnya implementasi tiga dimensi strategi diplomasi publik Indonesia; dan (3) kuatnya pengaruh doktrin *Melanesian Renaissance* dalam perpolitikan domestik Vanuatu (Sabir, 2018).

Adriana Elisabeth dalam jurnalnya menjelaskan beberapa dimensi penting yang berpotensi kuat terdapat dalam isu Papua. Dimensi persoalan Papua sangat beragam, mulai dari lokal, nasional dan bahkan internasional. Karakteristik atau dimensi internasional Papua ditentukan oleh peran aktor negara (*state actor*) dan aktor non-negara (*non-state actor*) yang secara konsisten dan terus menerus telah menginternasionalisasi isu Papua (Elisabeth, 2016).

David Robie dalam jurnalnya menjelaskan mengenai faktor media dalam pengaruh kasus-kasus yang terjadi di Indonesia bagian Timur terkait dengan isu kemerdekaan yang ingin diraih oleh bagian Indonesia di wilayah Timur seperti Timor Leste dan Papua Barat. Hal tersebut menjelaskan peran media terkait kasus-kasus

Indonesia bagian Timur dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan (Robie, 2013).

Catherine Scott dan Neles Tebay dalam jurnalnya menjelaskan mengenai ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah yang dianggap gagal menerapkan undang-undang otonomi khusus tahun 2001 yang mengakibatkan terjadinya demonstrasi besar-besaran pada tanggal 12 Agustus 2005. Dengan adanya hal tersebut masyarakat Papua menuntut keadilan kepada pemerintah Indonesia (Scott & Tebay, 2006).

Nino Viartasiwi menjelaskan mengenai tuntutan Papua Barat yang menginginkan kemerdekaan dengan menggunakan aspek sejarah yakni Papua Barat menyatakan bahwa wilayahnya adalah jajahan kolonial Belanda dan mempertanyakan hubungannya dengan Indonesia saat itu, lalu saat referendum tahun 1969 yang disebut dengan *Act of Free Choice* untuk menentukan nasib Papua Barat saat itu (Viartasiwi, 2018)

Dengan adanya karya – karya tulisan di atas, tentu membantu penulis dalam memberikan gambaran kasus yang ada mengenai dukungan negara – negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan dalam Organisasi Papua Merdeka. Namun disisi lain dengan adanya karya - karya di atas, penulis ingin mengisi suatu analisa yang belum ada yaitu mengenai diplomasi publik Indonesia terhadap negara – negara di kawasan Pasifik Selatan terhadap Organisasi Papua Merdeka.

G. Landasan Konseptual

Dalam mempermudah proses penelitian, maka diperlukan sebuah landasan untuk memperkuat analisa dimana pada kasus ini, penulis menggunakan landasan konsep diplomasi publik. Diplomasi adalah sebuah cara untuk mencapai kepentingan seorang aktor dengan cara damai untuk mengatasi suatu konflik atau masalah. Dewasa ini, aktivitas diplomasi semakin meningkat seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Jika sebelumnya diplomasi diwarnai dengan isu-isu terkait perang, kini muncul isu-isu lain seperti lingkungan, pariwisata, terorisme, kesehatan dan hak asasi manusia yang menjadi sasaran baru. Perkembangan dunia, teknologi informasi serta aktor membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern, dalam hal ini diplomasi publik.

Diplomasi publik dipandang sebagai sarana komunikasi negara berdaulat dengan publik di negara lain yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempengaruhi publik di luar negeri. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government-to-government-relations* maka diplomasi publik lebih ditekankan pada *government-to-people-relations* atau bahkan *people-to-people-relations*. Tujuannya, agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan dan politik luar negeri yang lebih luas.

Melalui buku *“Public Diplomacy”*, Mark Leonard menjelaskan bahwa diplomasi publik adalah tentang cara membangun hubungan dengan memahami kebutuhan, budaya dan masyarakat, mengkomunikasikan sudut pandang, juga membenarkan mispersepsi dalam komunitas internasional, serta mencari area dimana pemerintah dapat menemukan kesamaan pandangan. Mark Leonard melihat diplomasi publik sebagai barang publik dimana citra dan reputasi suatu negara terbentuk untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk terlaksananya kepentingan suatu negara. Mark Leonard menilai bahwa terdapat empat tingkatan/tujuan yang dapat dicapai dengan adanya diplomasi publik, yakni (Leonard, 2002):

1. Meningkatkan rasa kekeluargaan antara masyarakat dengan satu negara, dengan cara membuat mereka memikirkan bahwa negara tersebut memiliki citra yang baik.
2. Meningkatkan apresiasi dari publik terhadap satu negara seperti mempunyai persepsi atau penilaian yang positif.
3. Memperkuat hubungan dengan masyarakat di satu negara, contohnya dari pendidikan hingga kerjasama ilmiah, mendorong masyarakat di suatu negara untuk mendatangi tempat-tempat wisata, menjadi konsumen produk buatan lokal, dan memberi pengetahuan mengenai nilai-nilai yang dijunjung oleh para aktor
4. Mempengaruhi masyarakat di satu negara untuk berinvestasi dan menjadi partner dalam hubungan politik

Penyelenggaraan diplomasi publik tidak lepas dari komunikasi politik luar negeri kepada publik asing. Dalam implementasinya, Mark Leonard membagi tiga dimensi yaitu *news management* atau manajemen berita, *strategic communications* atau komunikasi strategis dan *relationship building* atau membangun relasi sebagai bentuk upaya untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya (Leonard, 2002).

1. *News Management*

Berkat kemajuan teknologi di era saat ini, berita tidak hanya terbatas pada publik domestik saja tetapi berita juga dapat menyebar secara cepat dan masif dari satu negara ke negara lainnya tanpa melihat batasan teritorial. Hal ini berarti penggunaan media sebagai penyebar informasi menjadi hal yang sangat penting sebagai media diplomasi publik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai aktor yang menjalankan diplomasi berupaya untuk melakukan manajemen berita dengan memberikan konten berita untuk menjelaskan suatu isu domestik terhadap publik asing melalui berbagai media yang dilakukan setiap hari atau minggu, sesuai dengan kepentingan nasional. Hal tersebut bertujuan agar dapat menyelaraskan komunikasi sebuah negara terhadap pihak negara maupun non-negara lainnya dalam penyelesaian permasalahan.

2. *Strategic Communications*

Komunikasi strategis sendiri serupa dengan kumpulan aktivitas yang menyerupai kampanye politik. Saat melakukan komunikasi strategis, seorang aktor harus menetapkan satu pesan strategis yang ingin disampaikan dan merencanakan

serangkaian kegiatan untuk menyampaikan pesan tersebut secara terus menerus kepada publik hingga publik terpengaruh oleh pesan tersebut. Aktivitas ini ditujukan lebih kepada publik asing seperti individu yang bertujuan untuk membentuk persepsi suatu negara secara keseluruhan.

3. *Relationship Building*

Berbeda dengan kedua dimensi di atas, pada dimensi ketiga lebih menekankan mengenai dampak jangka panjang penerapan diplomasi publik itu sendiri. Pada dimensi pembangunan hubungan ini, pendekatan jangka panjang lebih ditegaskan seperti beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, membangun jaringan nyata dan virtual, dan memberi publik pada akses saluran media. Hubungan yang dibangun ini kemudian dapat menciptakan analisis umum terhadap sebuah isu dan dapat memberikan suatu pemikiran yang lebih jelas pada target yang dituju, terkait motivasi dan faktor aktor pelaku yang menyebabkan mereka melakukan suatu aksi dan diskusi ini akan berjalan di antara para aktor dengan latar yang berbeda. Membangun hubungan secara tradisional dipandang sebagai proses yang harus dilakukan secara tatap muka dan pada tingkat pribadi.

Berdasarkan penjelasan Mark Leonard tersebut, maka dapat dilihat bahwa diplomasi publik berfungsi untuk memajukan kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding*, *informing* dan *influencing* masyarakat luar negeri untuk mencapai tujuan politik luar negerinya. Dalam hal ini, publik memegang peranan

yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya yang sangat variatif. Oleh karena itu, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen *soft power*.

Dengan demikian, konsep diplomasi publik oleh Mark Leonard ini akan digunakan sebagai landasan analisis dalam hal pembahasan terkait strategi diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan guna mencari simpati dan dukungan politik mengenai Papua dan OPM. Strategi diplomasi publik Indonesia ini kemudian diklasifikasikan menjadi tiga dimensi yaitu *news management*, *strategic communications* dan *relationship building*. Di samping itu, dijelaskan secara implisit keterkaitan upaya tiga dimensi tersebut dengan pencapaian tujuan/dampak yang akan didapatkan oleh Indonesia.

H. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam metode tersebut dilakukan dengan studi kasus dengan menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Metode kualitatif ini didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian (Moleong, 2002, hal. 3). Dalam ilmu sosial dan politik, penelitian kualitatif biasa digunakan sebagai metode utama dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh sifat

ilmu sosial yang mendasarkan pengetahuannya pada dinamika interaksi sosial. Karena interaksi sosial adalah fenomena abstrak maka tidak dapat sepenuhnya dihitung.

1. *Metode Pengambilan Data*

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan data akan diperoleh melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2006, hal. 225). Data sekunder ini dapat didefinisikan sebagai data atau tulisan yang berupa laporan dari penelitian orang lain di mana diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk memperoleh data penulis akan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa laporan resmi organisasi dan pemerintah, buku-buku, surat kabar, jurnal, laporan, media massa maupun internet seperti web pemerintahan resmi, berita-berita yang memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Melalui studi kepustakaan dan dokumen penulis ingin menemukan beberapa hal untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara yang berada di kepulauan Pasifik terkait OPM?

2. *Metode Analisis Data*

Setelah tahapan pengumpulan data selesai, tahapan selanjutnya adalah proses analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses dalam mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikan data yang diperoleh, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan hal yang penting, dan kemudian memutuskan apa yang dapat diinformasikan kepada pembaca (Moleong, 2002, hal. 103). Dalam penelitian ini, pemaparan yang jelas dan rinci sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai proses dalam penentuan strateginya.



BAB II

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN TERKAIT OPM

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan telah lama terjalin dan terus mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Isu internasionalisasi Papua yang menjadi agenda OPM kemudian mendapat perhatian dan dukungan dari beberapa negara di Pasifik Selatan, terutama Vanuatu. Dalam menjaga kedaulatannya, Indonesia melakukan berbagai upaya, termasuk menyuarakan posisinya baik dalam forum regional maupun internasional serta menggunakan *soft power*-nya.

A. Posisi Negara-Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Terkait OPM

Liminalitas geopolitik Papua dalam kaitannya dengan Asia dan Kepulauan Pasifik menempatkannya sebagai 'tanda hubung' dalam konstruksi pan-regional Asia-Pasifik. Penduduk asli Papua dianggap sebagai etnis Melanesia dan berbagi banyak hubungan budaya dan sosial dengan masyarakat Melanesia dalam ikatan yang membentang melintasi batas negara. (Lihat Gambar 2.1)

Gambar 2.1 Peta Kawasan Pasifik Selatan



Sumber: Wikimedia, 2008, dalam https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Oceania_UN_Geoscheme_Map_of_Melanesia.svg/1024px-Oceania_UN_Geoscheme_-_Map_of_Melanesia.svg.png diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

Hal ini kemudian memberikan kesempatan bagi OPM untuk melobi negara-negara dan kelompok/organisasi politik di Pasifik Selatan khususnya di sub-kawasan Melanesia. Di sisi lain, dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menggagalkan usaha OPM di kawasan Pasifik Selatan. Dengan adanya dua aktor dengan kepentingan yang berbeda ini menjadikan negara-negara Pasifik Selatan mengambil salah satu posisi yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendukung OPM dan pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. Pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)

a) Vanuatu

Masyarakat adat Melanesia telah lama memiliki ikatan kuat yang melampaui batas negara. Membangun kembali *'Melanesia-ness'* dan dekolonisasi semua negara Pasifik telah menjadi tujuan penting bagi orang Melanesia sejak tahun 1970-an, satu dekade ketika sebagian besar negara di kawasan tersebut menjadi merdeka. Hal tersebut, sebagian besar didasarkan pada prinsip-prinsip Jalan Melanesia, *wantokism* (ikatan berdasarkan bahasa bersama, suku, desa dan afiliasi komunitas) dan *kastom* (budaya adat) (Webb-Gannon, 2014).

Vanuatu adalah contohnya; setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1980, Bapak Pendiri dan Perdana Menteri pertamanya, Walter Lini, menyatakan bahwa “Vanuatu tidak akan sepenuhnya bebas sampai semua orang Melanesia bebas” (Cullwick, 2013). Dewasa ini, Vanuatu merupakan salah satu negara yang mendukung orang Papua dan keinginan mereka untuk merdeka. Pada 2010, parlemen Vanuatu bahkan sampai mengadopsi Rancangan Undang-Undang *Wantok Blong Yumi* atau UU yang menegaskan pengakuan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Vanuatu juga bertindak sebagai tempat perlindungan untuk para aktivis Papua, dimana organisasi seperti OPM dan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) masing-masing mendirikan kantor perwakilan dan kantor pusat disana sebagai upaya memelihara hubungan bilateral (AP, 2019).

Hingga saat ini, pemerintah Vanuatu dengan gencar selalu membawa masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dalam forum-forum internasional, termasuk dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mulai dari Sidang Tahunan Majelis Umum PBB 2013, Sidang Dewan HAM PBB 2014, Sidang Tahunan Majelis Umum PBB 2016, Sidang HAM PBB 2017 hingga Sidang Majelis Umum PBB 2018, Vanuatu menyuarakan untuk dibukanya kasus-kasus ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua, terutama kasus HAM yang dianggap selalu ditutup-tutupi oleh pemerintah Indonesia serta memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua (Sabir, 2018).

Bahkan pada Januari 2019, Vanuatu dengan sengaja menyelundupkan Benny Wenda¹ dalam delegasinya saat bertemu Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), Michelle Bachelet, di Jenewa (Anya, 2019). Namun, usaha lanjutan Vanuatu dalam melibatkan Benny Wenda gagal, ketika PBB tidak mengizinkan Benny Wenda memasuki aula Sidang Majelis Umum PBB 2019 dan bergabung dengan delegasi dari Vanuatu. PBB sendiri mempunyai aturan yang ketat yang hanya mengizinkan perwakilan negara yang masuk dalam ruang sidang.

b) Kepulauan Solomon

Sama halnya dengan Vanuatu, Kepulauan Solomon juga mendukung dalam usaha kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri bagi warga Papua. Pada Sidang Majelis Umum PBB 2016, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare,

¹ Salah satu tokoh utama dan pencetus perjuangan rakyat Papua.

menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat dan hubungannya dalam penentuan nasib sendiri, sebagaimana kutipan berikut:

“Pelanggaran HAM di Papua Barat dan pengejaran penentuan nasib sendiri oleh Papua Barat adalah dua sisi mata uang yang sama. Banyaknya laporan tentang pelanggaran HAM di Papua Barat menekankan bukti kuat yang melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri dengan pelanggaran HAM langsung yang dilakukan oleh Indonesia dalam upayanya untuk meredam segala bentuk oposisi.” (Blades, 2016)

Isu bermuatan politik ini juga turut menjadi sorotan media dan rakyat Solomon. Dengan menyejajarkan diri bersama Indonesia, memperlihatkan kelemahan pemerintah dalam menangani masalah yang beresonansi dengan akar rumput mereka. Mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo, pernah mendapatkan kritikan media dan rakyat Solomon setelah kunjungannya dari Indonesia. Kunjungan tersebut diduga dibayar oleh Indonesia dan Lilo mengutarakannya sebagai "momen terobosan" yang mana manfaat akan datang seiring waktu. *Solomon Star News* menggambarkan Lilo telah "dibujuk" oleh Indonesia untuk mengubah posisinya di Papua Barat, menandakan ketidakpercayaan media terhadap motif Indonesia (Webb-Gannon, 2014).

c) Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS)

Jika dua aktor pendukung Papua Merdeka sebelumnya merupakan negara yang berdaulat, FLNKS adalah sebuah organisasi partai politik pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru. Entitas non-negara ini beranggotakan etnis pribumi Kanak yang termasuk ke dalam Melanesia, yang memperjuangkan kemerdekaan Kaledonia Baru dari kekuasaan Perancis. Kesamaan situasi dan kondisi membuat FLNKS bersimpati terhadap Papua Barat dan sebaliknya menjadi kesempatan bagi Papua Barat untuk menarik dukungan aktor internasional. Salah satu bentuk dukungan dan intervensi dari FLNKS adalah dengan mengadakan pertemuan khusus dengan aktivis Papua merdeka yang dihadiri oleh masing-masing pemimpin. FLNKS kemudian menyatakan dukungannya untuk Papua pada pertemuan *Melanesian Sparehead Group*² (MSG) 2013, sebagaimana pernyataan berikut:

“Kami meminta perwakilan Papua Barat datang ke Kaledonia Baru untuk menjelaskan situasinya kepada kami. Kami tidak bisa mengabaikan masalah ini yang mana merupakan pelanggaran HAM di Papua Barat.” (MacLellan, 2013)

Sama dengan Vanuatu, pimpinan FLNKS juga mendukung penuh agar Papua segera mengajukan dan menjadi keanggotaan penuh secepatnya dalam organisasi MSG dibandingkan Indonesia.

² *Melanesian Sparehead Group* (MSG) merupakan organisasi sub-regional di kawasan Pasifik Selatan, yang terdiri dari negara-negara Melanesia yaitu Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, Papua Nugini dan organisasi FLNKS. Pada Juni 2015, Indonesia kemudian diakui sebagai anggota asosiasi.

Ketiga aktor diatas cenderung kontra dengan Indonesia dengan terus menyuarkan dekolonisasi dan isu HAM di Papua dalam forum-forum internasional. Dampak terangkatnya kasus tersebut telah membuat Indonesia terpojokkan dan mempengaruhi citra dan reputasi Indonesia. Hal ini tentu membuat Indonesia bertindak defensif dengan langkah pertama yaitu membantah tuduhan dan pernyataan yang dilontarkan. Dikarenakan hubungan dengan negara-negara Pasifik sangatlah penting bagi Indonesia mengingat jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia akan mengakibatkan mereka berpihak pada gerakan Papua Merdeka, Indonesia mencoba mendekati negara-negara tersebut.

Setelah membantah tuduhan dan pernyataan negara-negara tersebut, kemudian Indonesia mencoba meluruskan informasi, menanamkan pesan strategis dan kemudian membangun hubungan melalui kerjasama dalam beberapa bidang. Dengan diterimanya Indonesia tersebut bisa meningkatkan kerjasama Indonesia dengan anggota MSG khususnya Vanuatu, tindakan tersebut ditunjukkan oleh Indonesia dengan upaya Indonesia untuk menjadi anggota penuh pada MSG yang awalnya sebagai negara peninjau. Terselenggaranya dialog politik yang positif antara Indonesia dan anggota organisasi tersebut akan mempermudah Indonesia dalam menjalin hubungan positif dengan lainnya. Karena salah satu kepentingan Indonesia dalam menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik lainnya adalah dengan menjaga stabilitas nasional dan regional Pasifik sendiri.

2. Pendukung NKRI

a) Fiji

Fiji sebelumnya merupakan salah satu negara yang mendukung kebebasan Papua Barat. Namun, dukungan untuk orang-orang Papua Barat berkurang ketika hubungan diplomatik dan strategis mereka dengan Indonesia berkembang. Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, mengatakan bahwa:

“Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak bisa diganggu gugat, maka ketika kita berurusan dengan Papua Barat dan penduduknya, kita tidak punya pilihan selain berurusan dengan Indonesia dengan cara positif dan konstruktif.” (Tan, 2015)

Pada 2019, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mendapat kunjungan dari mantan Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola. Dalam pertemuan tersebut, Wiranto dengan Inoke Kubuabola membahas terkait posisi kedaulatan Indonesia, khususnya Papua. Inoke Kubuabola menyampaikan sikap kepada Indonesia terkait kedaulatan wilayah Papua dan Papua Barat yang sudah menjadi milik Indonesia. Integritas tersebut ada sejak keputusan yang dikeluarkan oleh PBB terkait Papua³ (Safitri, 2019).

³ Integritas Papua dalam Indonesia diakui semenjak disahkannya Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969 tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian dari NKRI.

b) Papua Nugini

Papua Nugini merupakan negara yang mengakui Papua sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia, pemerintah PNG tidak pernah mengangkat masalah Papua dalam forum nasional atau regional, apalagi di forum internasional (Tebay, 2015). Dukungan Papua Nugini untuk Indonesia berkali-kali diungkapkan oleh para pemimpinnya.

Pada Pertemuan MSG 2011, Perdana Menteri Papua Nugini terlama pada saat itu, Sir Michael Somare, menggarisbawahi bahwa isu Papua merupakan masalah dalam negeri bagi Indonesia dan bukan sesuatu yang dapat dibahas dalam organisasi regional. Pada 2018, Menteri Luar Negeri Papua Nugini dibawah pemerintahan Peter O'Neill, Rimbink Pato, bertemu dengan Retno Marsudi dan mengutarakan dukungan Papua Nugini pada status Papua di Indonesia yang diakui sebagai bagian integral dari NKRI. Pada 2019, Perdana Menteri Papua Nugini yang baru, James Marape, kembali menegaskan bahwa Papua Nugini menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak berkeinginan untuk ikut campur dalam urusan dalam negerinya. (Blades, West Papua, *The Issue That Won't Go Away for Melanesia*, 2020)

Kedua negara tersebut sebelumnya sama seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS yang mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan hubungan diplomatik Fiji dan Papua Nugini dengan Indonesia berkembang, negara-negara tersebut mengubah posisinya. Indonesia melakukan langkah strategis untuk mematahkan dukungan terhadap Papua merdeka melalui

kerjasama bilateral yang telah dimulai, antara lain bidang perdagangan, investasi, pendidikan dan bantuan dana. Langkah tersebut dinilai sebagai usaha agar negara-negara seperti Fiji dan Papua Nugini yang memang membutuhkan kerjasama tersebut agar mau untuk tidak ikut campur dalam kasus pelanggaran HAM di Papua dan juga untuk tidak mendukung Vanuatu dalam kampanyenya tersebut. Negara Indonesia pun juga mengatakan kepada PBB bahwa kasus tersebut sudah selesai dilaksanakan.

B. Respon Indonesia Terkait Isu OPM

Indonesia tak hanya berdiam diri setiap kali dipojokkan oleh Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLKNS terkait dengan isu Papua melalui forum regional maupun internasional. Indonesia mencoba meningkatkan kapasitasnya dalam berdiplomasi dengan bergabung dalam berbagai organisasi kawasan terkait untuk mengamankan posisi Indonesia dalam isu Papua. Bergabungnya Indonesia ini, mempermudah Indonesia untuk mengubah dukungan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, khususnya negara-negara dengan kedekatan Melanesia, mengenai kedaulatan Indonesia terhadap Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan penting untuk dikelola dengan baik demi menjaga stabilitas nasional maupun regional.

1. Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

Indonesia pertama kali diterima dan diberikan status sebagai *observer* dalam organisasi resmi negara-negara Melanesia, MSG, pada Pertemuan MSG ke-18 di Fiji tahun 2011. Selain Indonesia, terdapat juga kelompok pro-kemerdekaan Papua yang juga berusaha dan ingin mendapatkan status sebagai anggota dari MSG. Dalam membendung usaha kelompok tersebut, Indonesia pada Pertemuan MSG ke-19 tahun 2013 di Kaledonia Baru, mengundang perwakilan MSG untuk melakukan kunjungan ke Papua. Kunjungan ini bertujuan untuk mempersilahkan para perwakilan dalam melihat langsung terkait dengan situasi dan kondisi dari aspek pembangunan ekonomi dan keamanan di Papua. Lobi ini kemudian menghasilkan persetujuan para pemimpin MSG untuk menunda keputusan tentang aplikasi keanggotaan kelompok pro-keemrdekaan Papua. Keputusan hanya akan dibuat setelah delegasi perwakilan MSG mengunjungi Jakarta dan Jayapura dan melaporkan kembali kepada para pemimpin dalam waktu enam bulan pasca-pertemuan.

Kunjungan tersebut baru terlaksana pada Januari 2014 dimana delegasi dan menteri dari negara-negara MSG –kecuali Vanuatu– melakukan kunjungan ke Indonesia dengan tema “*Promoting Economic Ties and Development Cooperation*”. Selain untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi di Papua, kunjungan ini juga termasuk untuk melihat perkembangan terbaru terkait keturunan Melanesia di Indonesia serta meningkatkan hubungan kedekatan antara MSG dengan Indonesia. Akhir kunjungan ini menghasilkan komitmen penting berupa ‘*Joint Statement*’ yang

disepakati antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota MSG. Pernyataan bersama ini terdiri dari sembilan paragraf, yang intinya adalah; saling mendukung kedaulatan, persatuan dan integritas teritorial masing-masing serta prinsip ‘tidak campur tangan’ dalam urusan internal masing-masing; konsisten dengan Piagam PBB; meningkatkan kerja sama di berbagai bidang area kepentingan bersama; serta meningkatkan pertukaran kunjungan pejabat, akademisi, pemuda dan olahragawan. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014).

Kunjungan tersebut kemudian memberikan hasil pada Pertemuan Pemimpin MSG 2014 di Port Moresby, yang menanggukkan pengajuan keanggotaan kelompok pro-kemerdekaan Papua dan setuju *‘untuk mengundang semua kelompok agar membentuk sebuah kelompok payung inklusif dan bersatu dalam sebuah konsultasi dengan Indonesia untuk mengajukan sebuah aplikasi keanggotaan baru’*. Ini merupakan kemenangan bagi diplomasi Indonesia dalam menggagalkan upaya gerakan Papua merdeka untuk bergabung dengan MSG. Keputusan yang diambil oleh MSG, pada dasarnya, memberikan pemerintah Indonesia sebuah hak veto atas kebijakan MSG di Papua. (Elmslie, 2015).

Meskipun demikian, seperti yang sudah diketahui bahwa beberapa negara anggota MSG, utamanya Vanuatu, terus menunjukkan dukungannya untuk penentuan nasib sendiri bagi orang Papua. Vanuatu kemudian menjadi tuan rumah pertemuan Desember 2014 untuk menyatukan para aktivis yang berbasis di Jayapura serta para

pegiat yang diasingkan dan membentuk front persatuan antara kelompok-kelompok yang bersaing yaitu ULMWP. Organisasi itu menjadi payung utama dari tiga organisasi Papua pro-kemerdekaan yang sebelumnya berjalan masing-masing; *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL),⁴ Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), dan *West Papua National Parliament* (WPNP). Pada bulan Februari 2015, ULMWP kembali mengajukan aplikasi untuk keanggotaan MSG penuh.

Sebelum diselenggarakannya Pertemuan MSG 2015, Indonesia kembali melakukan upaya untuk membendung kapasitas diplomatik gerakan pro-kemerdekaan Papua di MSG. Pada Maret 2015, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan berbagai kunjungan termasuk ke Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Fiji. Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua Barat dan Papua Nugini mengumumkan grasi untuk lima tahanan politik dan membuat keputusan lain yaitu melonggarkan keterbatasan media internasional dalam meliput Papua Barat secara langsung; *“Mulai hari ini, wartawan asing diizinkan dan bebas untuk datang ke Papua, seperti halnya mereka dapat mengunjungi daerah lain.”* (Suhartono, 2015)

Upaya diplomasi Indonesia tersebut membuahkan hasil pada Pertemuan MSG 2015 di Kepulauan Solomon, yang mana para pemimpin MSG mencapai suatu kesepakatan dan memutuskan menaikkan status Indonesia menjadi anggota asosiasi.

⁴ WPNCL sendiri adalah salah satu gerakan separatisme yang dapat dikatakan merupakan anak turunan dari OPM.

Sedangkan ULMWP diberikan status sebagai *observer*. Para pemimpin MSG menyetujui bahwa keanggotaan asosiasi diberikan kepada Indonesia yang mewakili lima provinsi Melanesia di Indonesia (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur). Sedangkan status ULMWP sebagai *observer* dibawah kategori *Non-Government Organization* (NGO) yang mewakili orang-orang Melanesia di luar negeri, bukan orang-orang Melanesia yang ada di Papua dan Papua Barat. Ini berarti ULMWP tidak memiliki hak untuk mengurus atau ikut campur dalam urusan internal di Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat. Di tahun yang sama, prinsip-prinsip pembentukan MSG direvisi dengan menegaskan bahwa anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan internal negara lain. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Di tahun 2016 kembali diadakan pertemuan khusus MSG untuk membahas keberlanjutan status keanggotaan UMLWP di MSG. Namun, pertemuan khusus tersebut tidak kunjung mewujudkan tujuan UMLWP sebagai anggota penuh di MSG. Hal tersebut disebabkan oleh keputusan MSG untuk menunda pembahasan kembali status keanggotaan UMLWP dikarenakan perlunya penyesuaian kriteria ulang untuk menjadi anggota penuh MSG. Hingga Pertemuan MSG di tahun 2018, usaha UMLWP dalam pengajuan keanggotaan kembali ditolak berkat hasil dari diplomasi dan pengaruh Indonesia di MSG. Indonesia dalam MSG dinilai memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota MSG dimana Indonesia bertindak sebagai jembatan antara MSG ke berbagai kerjasama regional lainnya seperti ASEAN dan

lainnya. Ditambah lagi, sejumlah bantuan teknis terus diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara anggota MSG dan Sekretariat MS.

Pada pertemuan yang sama, perwakilan Indonesia menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat dalam mewujudkan visi MSG 2038 *'Prosperity for All'* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia. Para pemimpin MSG, menyatakan sependapat dengan Indonesia bahwa penting bagi MSG untuk fokus pada tujuan bersama mencapai kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, *good governance* dan keamanan. Akan sangat merugikan apabila perhatian MSG teralihkan oleh isu-isu yang tidak relevan dengan tujuan tersebut (Firmansyah, 2018).

2. Indonesia dalam *Pacific Islands Forum* (PIF)

Selain organisasi sub-kawasan MSG, Indonesia juga aktif terlibat dalam forum regional seperti PIF. Forum regional tersebut sering digunakan oleh OPM dan sejenisnya, dengan melobi aktivitis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun organisasi untuk mendorong isu kemerdekaan Papua dalam forum-forum yang ada. Seperti di KTT PIF 2015, isu pelanggaran HAM di Papua menjadi salah satu agenda atas desakan berbagai NGO. Semua NGO di kawasan Pasifik yang tergabung dalam *Pacific Islands Association of Non-Governmental Organizations* (PIANGO) memperlihatkan solidaritas dan mendorong forum-forum di Pasifik untuk

mengangkat isu Papua (Blades, West Papua, The Issue That Won't Go Away for Melanesia, 2020).

Dalam komunike PIF 2015, pimpinan forum mengungkapkan keprihatinan tentang situasi HAM di Papua dan sepakat untuk membuka dialog yang konstruktif dengan Indonesia mengenai masalah ini (Pacific Islands Forum Secretariat). Begitu pula dengan KTT tahun-tahun berikutnya dimana isu HAM di Papua masih menjadi agenda dan masih melakukan *engagement* dengan Indonesia sebagai rekan dialog dalam PIF. Dalam berbagai dialog itu, Indonesia berkali-kali mengeluarkan argumen bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral dari NKRI, sehingga secara tegas Indonesia menolak segala bentuk intervensi asing terhadap urusan dalam negeri.

Menanggapi tuduhan pelanggaran HAM di Papua, Indonesia menegaskan bahwa tuduhan tersebut didasari dengan itikad tidak baik dan motivasi politik. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perlindungan HAM merupakan amanah konstitusi bagi Indonesia. Indonesia juga menyoroti pembahasan yang terlalu berat ke satu sisi dan tidak melihat ke sisi lain, seperti kemajuan yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan ke Papua untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Indonesia mencatat bahwa pembangunan yang ada selama ini di Papua jauh lebih maju dari sebagian negara kepulauan di Pasifik.

Indonesia bahkan mengundang anggota PIF untuk melihat dan mengamati demokrasi Indonesia melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terjadi di

Jayapura, Papua dan Manokwari, Papua Barat pada 2017. Kunjungan forum terdiri dari Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Vanuatu, Sambue Antas dan Fetogi Vaai dari Komisi Pemilu Samoa dengan dukungan dari Sekretariat Forum. Pada Desember 2017, Indonesia kembali mengundang Sekretariat PIF ke dalam negeri untuk menghadiri *10th Bali Democracy Forum* di Tangerang, Banten (Pacific Islands Forum Secretariat).

Pada KTT PIF 2019 di Tuvalu, isu Papua dimasukkan lagi dalam agenda PIF dan hadirnya Benny Wenda sebagai delegasi dari Vanuatu. Hal ini membuat Kementerian Luar Negeri Indonesia mengajukan keberatan dan protes keras atas keikutsertaan Benny kepada sekretariat PIF. Pada KTT tersebut, delegasi Indonesia menjelaskan bahwa Papua memiliki hak otonomi khusus dan pemimpin yang dipilih secara demokratis yang berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia. Dalam Pemilu 2019 lalu, partisipasi politik tertinggi berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan presentase sebesar 88%, yang mana 94% diantaranya mendukung pemerintahan Jokowi (Sucipto, 2019). Protes keras juga diajukan oleh Australia, Selandia Baru dan Papua Nugini atas dimasukkannya isu Papua dalam agenda PIF oleh Vanuatu, sebagaimana juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyatakan bahwa:

“Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lombok tahun 2006. Australia tidak akan mendukung upaya yang melemahkan kedaulatan Indonesia atas

Papua dalam forum apa pun dan tidak akan mengaitkan diri dengan komunike PIF terkait hal itu.” (Doherty, 2019)

Selain Australia dan Selandia Baru, Perdana Menteri Samoa Tuilaepa Sailele Malielegaoi, juga keberatan untuk PIF lebih terlibat, karena Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia dan cara-cara untuk menangani isu tersebut sama dengan mengganggu kepentingan nasional Indonesia (MacLellan, West Papua High on Pacific Islands Forum Agenda, 2016). Dengan kata lain, negara-negara tersebut tidak ingin membuat Indonesia tersinggung dan mengakui isu Papua sebagai masalah yang sensitif. Lebih khusus lagi, sekretariat PIF selalu berhati-hati untuk menghindari penyebutan khusus tentang upaya penentuan nasib sendiri dalam pembahasan isu Papua dan secara konsisten mengakui kedaulatan Indonesia.

3. Indonesia dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

Di level internasional, hampir setiap tahun Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat isu Papua dalam forum PBB. Dimulai dari Sidang Majelis Umum PBB 2016, Perdana Menteri Vanuatu dan Kepulauan Solomon,⁵ yang didukung oleh Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga dan Palau, mengkritik catatan HAM di Papua dan mendesak PBB agar ikut turun tangan terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat (Blades, Pacific Leaders Raise West Papua at the UN, 2016). Usaha Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam pengangkatan isu Papua ini terus berlanjut

⁵ Pernyataan dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon pada Sidang Majelis Umum PBB 2016 dapat dilihat pada halaman 17.

hingga pertemuan PBB paling terbaru yakni Sidang Majelis Umum PBB 2019. Pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga kedaulatan, melalui delegasinya, membantah segala tuduhan Vanuatu dan Kepulauan Solomon.

Pada Sidang Majelis Umum PBB 2016, delegasi Indonesia Nara Rakhmatia, menyatakan bahwa Indonesia menilai apa yang dilakukan tujuh negara di Kepulauan Pasifik itu telah melanggar Piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorial. Tuduhan tersebut bermotif politik untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial dalam negeri mereka sendiri. Delegasi Indonesia juga mengkritik penggunaan forum Majelis Umum PBB oleh negara-negara tersebut, yang mana seharusnya membahas implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) bukan mengintervensi kedaulatan dan integritas negara tertentu (Aualiitia, 2016).

Pada Sidang Majelis Umum PBB 2019, melalui delegasi Rayyanul Sangaji, Indonesia kembali mempertanyakan motif dan pertanggungjawaban dari Vanuatu terkait tuduhan isu Papua. Indonesia menyebut motif Vanuatu bukan dilatari kepedulian terhadap HAM, melainkan kepentingan negara itu mendukung gerakan separatis di Indonesia. Indonesia meminta Vanuatu untuk kembali membaca fakta dan catatan sejarah, situasi terkini, serta perkembangan HAM di Indonesia yang sudah progresif. Indonesia juga kembali menegaskan bahwa Papua adalah bagian yang tidak dapat dibatalkan dari Indonesia dan itu adalah keputusan akhir yang tidak dapat dibalikkan dan permanen, merujuk pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera atau *Act*

of Free Choice) 1969 yang diadopsi menjadi Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (Septiari, 2019).

4. Pendekatan Bilateral Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan

Dengan meningkatnya masalah Papua dan Papua Barat di profil internasional, Indonesia kemudian mencoba menekankan pada hubungan bilateral antar negara-negara Pasifik Selatan. Walaupun tergolong negara kecil, tetapi di forum internasional seperti PBB, suara mereka tetap akan diperhitungkan sehingga Indonesia harus melakukan upaya pendekatan tersebut. Hal ini berfungsi agar Indonesia mempunyai teman yang bisa mendukung apa yang menjadi kebijakannya dalam berbagai kesempatan di forum-forum dunia. Pertama-tama, Indonesia mencoba meningkatkan hubungan dengan Fiji yang dianggap sebagai negara yang berpengaruh baik di MSG maupun di wilayah Pasifik Selatan.⁶

Setelah terjadi kudeta di Fiji tahun 2006, Indonesia membantu Fiji dengan transformasi dari rezim militer menjadi demokrasi dan juga memberikan bantuan teknis di beberapa bidang. Indonesia juga berperan penting dalam membantu mengembangkan *Pacific Islands Development Forum* (PIDF) yang dibentuk oleh Fiji setelah keanggotaannya dalam PIF ditangguhkan oleh tekanan Australia dan Selandia

⁶ Esala Nayasi, Direktur Divisi Politik dan Perjanjian Kementerian Luar Negeri Fiji, menyatakan bahwa Fiji pernah memegang berbagai jabatan penting seperti mengetuai *Secretariat of the Pacific Community's Governing Council*, *Committee of Representatives of Governments and Administrations* (CRGA) dan MSG, yang mengangkat kepemimpinan Fiji sebagai anggota yang berpengaruh di tingkat regional Pasifik; dikutip dari Makareta Komai, "Fiji's Foreign Policy and the New Pacific Diplomacy", *The New Pacific Diplomacy*, (2015), hal. 114.

Baru atas kudeta yang terjadi. Melalui PIDF, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan bantuan dan keterlibatan⁷ serta menawarkan diri sebagai saluran dimana negara-negara Pasifik, terutama Fiji, dapat berinteraksi tidak hanya dengan kawasan Asia yang dinamis, tetapi juga kawasan yang lebih luas. Bantuan dan tawaran tersebut tampak berhasil karena hampir tidak adanya penyebutan tentang isu Papua di forum resmi tersebut (Webb-Gannon, 2014).

Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan saat melakukan kunjungan kehormatan, juga sempat memberikan bantuan sebesar US\$5 juta sebagai simpati atas bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji pada akhir Februari 2016. Indonesia juga sempat memberikan bantuan kemanusiaan untuk Vanuatu saat dilanda bencana Topan Pam pada 2015 sebagai bentuk simpati dan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan Pemerintah Vanuatu (Nursalikah, 2015).

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi sangat memperhatikan kawasan Pasifik Selatan terutama negara-negara Melanesia yang memiliki kerawanan bencana, sama seperti yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga momentum bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memperkuat kerjasama tak hanya dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana yang dapat

⁷ Indonesia menjanjikan US\$20 juta selama lima tahun untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan bencana; berencana untuk melipatgandakan perdagangan menjadi satu miliar dolar di tahun-tahun mendatang; dan menguraikan bagaimana Indonesia dapat bertindak sebagai jembatan bagi negara-negara Pasifik dan Samudra Hindia.

mengancam masing-masing negara, namun juga kerjasama di bidang lain yang sejalan dengan tantangan dan potensi kedua negara.

Indonesia mencoba mengkontruksi pemikiran dari negara-negara Melanesia tentang kebaikan Indonesia, sehingga dapat berdampak pada dukungan terhadap Indonesia dalam isu Papua. Selain Fiji, Indonesia juga berhasil dalam meningkatkan hubungan dengan Papua Nugini yang mana telah menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia di forum terbuka. Dalam kunjungannya ke Papua Nugini pada Maret 2015, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Papua Nugini merupakan tetangga penting bagi Indonesia. Papua Nugini merupakan negara yang strategis untuk dijadikan sebagai partner kerjasama dalam menjaga keamanan di Papua, terutama untuk mempersempit ruang gerak kelompok separatis yang ingin melarikan diri ke Papua Nugini (Humas, 2015).

Usaha membangun hubungan bilateral dengan negara-negara di regional Pasifik juga telah menjangkau tujuh negara Pasifik yang sebelumnya mengangkat dan mendukung isu Papua di forum PBB tahun 2016.⁸ Di antara tujuh negara tersebut, beberapa diantaranya seperti Nauru dan Tuvalu telah merubah posisinya. Presiden Nauru, Baron Waqa, mengatakan bahwa negaranya mendukung setiap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat. Sementara Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, menyatakan sikap tidak ingin campur dengan kebijakan Indonesia. Tuvalu sangat menghargai HAM,

⁸ Merujuk pada halaman 29.

termasuk kebudayaan, tetapi Tuvalu tidak punya posisi untuk ikut campur dalam masalah tersebut.

Pernyataan kedua pemimpin negara tersebut muncul setelah kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Wiranto, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Nauru ke-50 tahun 2018. Dalam perayaan tersebut, pemerintah Indonesia juga turut menyemarakkan dengan menampilkan band musik asal Papua dan Papua Barat yang juga membawa misi persahabatan pemerintah Indonesia (Erdianto, 2018).

Selain itu, pemerintah Indonesia mencoba meningkatkan hubungan bilateral antar negara-negara Pasifik Selatan melalui *soft diplomacy*. *Soft diplomacy* merupakan perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik yang pada dasarnya bertujuan untuk menginformasikan, melibatkan dan mempengaruhi persepsi publik. *Soft diplomacy* yang dimaksud disini adalah melakukan pendekatan melalui bidang sosial dan budaya yang memanfaatkan instrumen kerjasama pelatihan, beasiswa, pembangunan dan lain-lain. Indonesia sendiri mempunyai beberapa program yang terbuka dan ditujukan untuk negara-negara Pasifik seperti Dharmasiswa, festival Melanesia dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Program-program pemerintah tersebut berguna untuk membangun citra baik kepada para warga asing yang ingin mempelajari kebudayaan Indonesia lebih dalam dan akan penulis jelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

BAB III

STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA TERHADAP NEGARA- NEGARA KAWASAN ASIA PASIFIK SELATAN

Untuk membendung dukungan terhadap upaya gerakan kemerdekaan Papua, penguatan posisi Indonesia terhadap negara-negara kawasan Asia Pasifik Selatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Selain meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan, pemerintah Indonesia juga harus menggunakan strategi diplomasi lainnya. Strategi diplomasi yang dijalankan pemerintah Indonesia didasari tiga dimensi, yaitu manajemen berita, komunikasi strategis dan membangun relasi serta keterkaitannya tiga dimensi tersebut dengan tujuan yang ingin dicapai.

A. Manajemen Berita

Manajemen berita atau pengaturan informasi pemberitaan merupakan dimensi yang memiliki kaitan erat dengan dinamika opini publik yang mana akan melihat, mengolah dan menilai informasi dalam pemberitaan yang menggambarkan suatu keadaan. Berkat kemajuan teknologi di era saat ini, berita tidak hanya terbatas pada publik domestik saja tetapi berita juga dapat menyebar secara cepat dan masif dari

satu negara ke negara lainnya tanpa melihat batasan teritorial. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk melakukan manajemen berita dengan memberikan konten berita sesuai dengan kepentingan nasional untuk menjelaskan suatu isu domestik terhadap publik asing. Dimensi ini kemudian menjadi langkah pemerintah Indonesia untuk meluruskan kesalahan persepsi publik internasional yang dikembangkan oleh Vanuatu dalam beberapa forum internasional. Pemerintah Indonesia melakukan upaya manajemen berita dengan menyampaikan informasi dan data-data terkait Papua melalui berbagai publikasi baik melalui media milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan setiap hari atau minggu. (Sabir, 2018).

Membantah pernyataan dan tuduhan dari negara-negara pendukung OPM terkait isu Papua menjadi hal pertama yang difokuskan pemerintah Indonesia dalam dimensi ini. Seperti yang sudah dijelaskan bab sebelumnya, negara-negara pendukung OPM seringkali mengangkat isu Papua di berbagai forum internasional seperti MSG, PIF hingga organisasi PBB. Setiap terangkatnya isu tersebut, Indonesia selalu menegaskan bahwa tuduhan tersebut tanpa bukti, bersifat politis dan tidak etis karena secara langsung mengganggu kedaulatan negara lain. Bantahan-bantahan pemerintah Indonesia ini kemudian disiarkan dan dipublikasikan ke berbagai media nasional dan internasional.

Pemberitaan bantahan-bantahan dari delegasi Indonesia di forum internasional kemudian menjadi *viral* seperti bantahan dari delegasi Nara Rakmatia pada Sidang Majelis Umum PBB 2016, delegasi Rayyanul Sangaji pada Sidang Majelis Umum

PBB 2019 dan yang terbaru, bantahan dari delegasi Silvany Pasaribu pada Sidang Majelis Umum PBB 2020. Ketiganya di waktu yang berbeda sama-sama menegaskan bahwa Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan negeri Indonesia. Di Sidang Majelis Umum PBB 2020 terbaru Vanuatu melalui Perdana Menteri Bob Loughman kembali mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua. Melalui hak jawabnya, delegasi Indonesia menggarisbawahi bahwa masalah HAM sering digunakan sebagai kedok kekhawatiran Vanuatu dalam mendukung advokasi separatisme Papua. Delegasi Indonesia juga mengungkit soal dukungan PBB kepada Indonesia yang mana Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia sejak 1945. Hal tersebut sudah didukung PBB dan komunitas global sejak beberapa dekade lalu yang bersifat final, tak dapat diubah dan permanen (Permana, 2020).

Selain memberitakan bantahan-bantahan delegasi Indonesia di forum internasional, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk meluruskan informasi yang dikembangkan oleh Vanuatu dan pendukung kelompok separatis Papua. Seperti pada tahun 2016, saat Emele Duituturaga, direktur eksekutif PIANGO, mengklaim telah menyerahkan laporan tentang situasi HAM di Papua kepada Sekretaris-Jenderal PBB Ban Ki-Moon secara langsung di sela-sela *World Humanitarian Summit* di Istanbul pada bulan Mei. Duituturaga bermaksud untuk menekan Indonesia atas dugaan pelanggaran HAM di Papua dan mendukung aspirasi separatis Papua.

Indonesia melalui media *The Jakarta Post* yang kemudian diunggah ulang di halaman *Facebook* resminya⁹, menanggapi hal tersebut dengan fakta bahwa perwakilan tetap Indonesia di New York memeriksa laporan tersebut ke kantor Ban Ki-Moon, yang dibantah oleh juru bicaranya sendiri dan menyebutkan bahwa isu tersebut disebarluaskan oleh kelompok anti-pembangunan di Papua (Bernama, 2016). Dalam tulisan “*Negative Propaganda of Papua*” tersebut lebih lanjut membantah tuduhan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon –yang mendukung aspirasi separatis Papua– mengenai pelanggaran HAM di Papua.

Presiden Jokowi secara pribadi telah menginstruksikan instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk yang terkait dengan Papua dan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian-kejadian di masa depan. Menkopolkam, Luhut B. Pandjaitan, juga telah membentuk tim terintegrasi yang beranggotakan Komnas HAM. Papua dan Papua Barat diberikan otonomi dan demokrasi yang luas, seperti yang dijamin oleh hukum nasional. Pemerintah provinsi dan lokal dipilih secara langsung oleh dan dipimpin dan dikelola oleh orang Papua. Pemerintah saat ini juga memfokuskan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, seperti pembangunan jalan tol Trans-Papua, bandara, dan pelabuhan laut, yang mana anggaran per-kapita di kedua provinsi tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia (Bernama, 2016).

⁹ Unggahan *Facebook* resmi milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat diakses pada <https://www.facebook.com/Kemlu.RI/posts/negative-propaganda-of-papuaallessandro-bernama-opinion-the-jakarta-post-12-july/1306442906058812/>

Tuduhan yang dilontarkan oleh negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon menunjukkan pembiasan dan politisasi negatif di Papua yang kemudian dibantah oleh Indonesia. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia meliris sebuah laporan berjudul “*No Genocide in West Papua*”. Dalam laporan ini, pemerintah Indonesia menjabarkan kondisi Papua dalam bentuk data statistik, fakta-fakta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, fakta-fakta tentang dinamika politik di Papua, serta perjalanan berdarah kelompok separatis Papua (Sabir, 2018).

Pada 2017, kelompok separatis Papua mengklaim bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai referendum yang ditandatangani oleh 1,8 juta warga Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB. Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Komite Dekolonisasi PBB, Rafael Ramirez, yang secara eksklusif dipublikasikan pertama kali di koran *The Guardian*. Ramirez menjelaskan bahwa mandat komite khusus ini hanya terbatas pada 17 *non-self-governing territories* atau bekas jajahan dan Papua tidak termasuk diantaranya. Ramirez mengatakan tidak menerima dokumen permohonan resmi tersebut dan mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat (Lamb, 2017):

“The special committee on decolonisation has not received nor can receive any request or document related to the situation of West Papua, territory which is an integral part of the Republic of Indonesia”

Pemberitaan ini kemudian juga dilaporkan oleh media massa lain seperti ABC News milik Australia¹⁰ dan RNZ milik Selandia Baru¹¹ serta media massa lokal seperti Kompas,¹² Tempo¹³ dan *The Jakarta Post*.¹⁴ Melalui *The Jakarta Post*, Ramirez menegaskan bahwa sangat tidak mungkin melakukan komunikasi dengan pihak yang berada di luar dari agenda Komite Dekolonisasi, saat ditanya mengenai komunikasi dengan Benny Wenda.

Pemerintah juga gencar dalam menginformasikan kemajuan dan pengembangan Papua yang merupakan salah satu kebijakan dalam negeri dibawah pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Trans-Papua, bandara dan pelabuhan laut; pemerintah Indonesia juga mengupayakan pembenahan dan penyesuaian seperti perbaikan kualitas listrik, peningkatan fasilitas perbatasan melalui Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, semua sedang diperbaiki atau diperbaiki, atau bahkan disesuaikan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur serta fasilitas membuat masyarakat lebih mudah untuk beradaptasi dan berinteraksi. Pembangunan

¹⁰ Samantha Hawley, “West Papua independence petition does not exist, United Nations says”, (2017), diakses melalui <https://www.abc.net.au/news/2017-09-29/west-papua-independence-petition-reports-false-say-un/9001538>

¹¹ RNZ, “UN committee rejects West Papua independence petition”, (2017), diakses melalui <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/340570/un-committee-rejects-west-papua-independence-petition>

¹² Kompas, “PBB Bantah Terima Petisi Referendum Papua Barat”, (2017) diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/29/15405451/pbb-bantah-terima-petisi-referendum-papua-barat>

¹³ Eka Yudha Saputra, “Ini Alasan PBB Tolak Kemerdekaan Papua Barat” , (2018), diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/1152838/ini-alasan-pbb-tolak-kemerdekaan-papua-barat>,

¹⁴ Tama Salim dkk., "UN refutes 'Guardian' report on Papuan petition", (2017), diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2017/09/29/un-refutes-guardian-report-on-papuan-petition.html>

berkesinambungan ini diyakini dapat memudahkan distribusi barang yang meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Percepatan pembangunan kesejahteraan di pulau Papua kemudian telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua mencapai 60,84 dan Papua Barat mencapai level 64.70. Angka tersebut meningkat masing-masing sebesar 0,78 poin (Merdiana, 2020) dan 0.96 poin dibanding tahun sebelumnya (Ali, 2020). Sementara itu, tingkat kemiskinan masyarakat Papua menurun dari 30,05% pada 2014 menjadi 26,55% pada 2019. Kemiskinan di Papua Barat juga menurun dari 27,13% menjadi 21,51% (Ihsanuddin, 2019). Dengan begitu, pengaturan pemberitaan dan pelurusan informasi mempunyai peran penting sebagai sarana untuk menghubungkan pemerintah Indonesia dengan publik global dalam menjelaskan keadaan di pulau Papua. Upaya dan hasil pemerintah tersebut memberikan nilai tambah bahwa masyarakat Papua memang diperhatikan dan menjadi bagian dari Indonesia.

B. Komunikasi Strategis

Diplomasi pada dasarnya adalah tentang komunikasi. Seorang diplomat yang berdiplomasi pada dasarnya mengemban tugas untuk membawa pesan atau informasi

untuk dikomunikasikan serta memahami dan membangkitkan konvergensi diantara berbagai macam aktor diplomatik. Komunikasi menjadi bagian penting dari strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan diplomasi. Pada kasus ini, pemerintah Indonesia melakukan komunikasi strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik mengenai isu Papua.

Komunikasi strategis sendiri serupa dengan kumpulan aktivitas yang menyerupai kampanye politik. Saat melakukan komunikasi strategis, seorang aktor harus mempunyai satu pesan yang ingin disampaikan kepada publik dan pesan yang ingin disampaikan tersebut harus terus menerus disampaikan kepada publik hingga publik terpengaruh oleh pesan tersebut (Leonard, 2002). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia ingin mengembangkan sejumlah pesan strategis yang terencana melalui serangkaian acara kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan. Pesan-pesan strategis itu antara lain bahwa ras Melanesia di Indonesia bukan hanya ada di pulau Papua saja tetapi juga di Maluku dan Timor melalui acara *Melanesian Culture Festival* dan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM melalui *Bali Democracy Forum*.

1. Melanesian Culture Festival

Pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui acara ini cukup strategis. Hal ini untuk mengimbangi kampanye yang dilakukan oleh kelompok Papua merdeka dan negara-negara pendukungnya yang memanfaatkan solidaritas ras Melanesia sebagai narasi dan mengklaim sebagai satu-satunya ras Melanesia di

wilayah NKRI sehingga secara ras dan budaya berbeda dan bukan bagian dari bangsa Indonesia (Putra, Legionosuko, & Majid, 2019).

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa Melanesia terbesar di dunia, bukan Papua Nugini, Fiji, Kaledonia Baru, maupun Nauru. Tercatat bahwa jumlah masyarakat ras Melanesia di Indonesia mencapai sekitar 13 juta orang – atau 40,9% dari total jumlah penduduk Melanesia di 20 negara/teritori di kawasan Asia Pasifik Selatan yang berjumlah total sekitar 31 juta orang – yang terkonsentrasi di 5 provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Dengan menggunakan pedoman “*Bhinneka Tunggal Ika*”, Indonesia berusaha menunjukkan kepada negara-negara Melanesia mengenai keragaman Indonesia yang salah satunya merupakan identitas Melanesia.

Penyampaian pesan strategis tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan langkah pertama yaitu penandatanganan ‘Naskah Piagam Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia’ oleh Gubernur Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 6 Oktober 2015 di Ambon, Maluku. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) pada tanggal 28 Juni 2016. Dikeluarkannya Permendagri tersebut semakin menguatkan kampanye pemerintah Indonesia dimana dasar tujuan FPMMI adalah

sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksinya masyarakat Melanesia dan juga sebagai wadah untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melanesia Indonesia (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017).

Selain pengukuhan identitas Melanesia di Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Melanesia, pemerintah Indonesia menyelenggarakan *Melanesian Culture Festival* yang dilaksanakan pada 26-30 Oktober 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. *Melanesian Culture Festival* merupakan acara rutin MSG yang diadakan setiap empat tahun sekali yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa Melanesia. Sebelumnya, Indonesia juga pernah berpartisipasi di festival yang sama yang diselenggarakan di Papua Nugini pada tahun 2014. Indonesia pada saat itu diwakili oleh Provinsi Papua yang membawa tim tari dari Jayapura dan Kabupaten Keerom dan memamerkan potensi Papua seperti buah merah dan batik Papua, sekaligus menjadi tamu kehormatan pada acara pembukaan.

Pada 2015, sejak Indonesia menjadi anggota asosiasi MSG, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggelar festival tersebut dengan tema “*Celebrating the Cultural Diversity of Melanesia World*” untuk menghormati acara tersebut dan mengundang seluruh anggota MSG. Festival terdiri dari empat program, yaitu konferensi budaya Melanesia, pertunjukan kesenian tarian di UPT Taman Budaya Nusa Tenggara Timur, pameran benda-benda budaya Melanesia di Museum Negeri Nusa Tenggara Timur serta pemutaran film dan dokumenter seperti Tanah Mama, Atambua

39 Derajat Celcius, dan Cahaya Dari Timur yang merupakan karya sutradara dalam negeri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Festival dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa Melanesia merupakan babak baru dalam tonggak ke-bhinnekaan festival Pasifik, yang mana: *“Dasar dari penyelenggaraan festival ini tidak hanya semata-mata karena persamaan masa lalu dan garis darah, akan tetapi karena memiliki cita-cita yang sama. Cita-cita dalam hal membentuk negara yang adil, bersatu dan bersaudara. ‘Diversity’ tidak boleh menghalangi persatuan karena ‘diversity’ sendiri dapat dirawat, dikembangkan serta diperkenalkan pada dunia yang lebih luas lagi.”* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015)

Penyelenggaraan festival tersebut membawa pesan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia merupakan salah satu negara Melanesia yang masyarakat dan budayanya dilestarikan dan dipedulikan oleh pemerintah. Hal ini juga memojokkan kelompok separatis yang memakai dalih ras Melanesia – yang mana menciptakan kondisi yang tidak stabil di dalam negeri – menjadi landasan yang tidak jelas. Sebab dengan adanya festival ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Melanesia Indonesia sudah mendapat perhatian khusus dari negara sehingga tidak ada alasan lain bagi kelompok tertentu untuk memberontak dan berusaha memisahkan diri dari Indonesia.

Festival tersebut kemudian diakhiri dengan kesepakatan *Kupang Message* atau pesan dari kupang bersama negara-negara Melanesia atau MSG lainnya. *Kupang*

Message merupakan rangkaian perjanjian kerjasama budaya yang disepakati oleh negara-negara anggota MSG dengan tujuan untuk menghormati perbedaan budaya dan terus melestarikan budaya Melanesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Festival juga ditutup dengan peluncuran buku oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berjudul “Diaspora Melanesia di Nusantara” yang berisi kajian keilmuan tentang populasi dan kebudayaan Melanesia serta perspektif Melanesia dalam konteks ke-Indonesia-an (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Indonesia secara konsisten berusaha menunjukkan identitas Melanesia-nya dengan berpartisipasi pada festival yang sama yang diselenggarakan di Honiara, Kepulauan Solomon pada tahun 2018 (Ase, 2018). Sebelum menghadiri festival tersebut, Indonesia melalui Komunitas Tiga Batu Tungku yang mewadahi elemen masyarakat Papua Maluku dan Nusa Tenggara Timur, menyelenggarakan Festival Seni dan Budaya Melanesia Nusantara dengan tema "Dari Melanesia untuk Indonesia Raya" yang bertujuan untuk mengangkat seni dan budaya lokal untuk memperkuat kebhinekaan serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Festival ini diisi dengan parade kolosal seniman dan budayawan Indonesia yang berasal dari Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur, yang mana merupakan momen menunjukkan eksistensi seni dan budaya Melanesia di tiga wilayah timur Indonesia di pentas nasional (Putra Y. M., 2017)

Pada 1-10 Juli 2018, Indonesia diundang untuk berpartisipasi dalam *Melanesian Arts & Cultural Festival* (MACFEST) di Kepulauan Solomon bersama anggota MSG

lainnya. Dalam MACFEST, partisipasi Indonesia diisi dengan pemutaran film memperkenalkan tentang kebudayaan Melanesia di Indonesia, tempat-tempat wisata, dan seperti apa penampakan provinsi-provinsi yang mempunyai budaya Melanesia di Indonesia serta pementasan tari dari Papua. Dalam pementasan tari juga turut dijelaskan tentang Papua yang merupakan salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki budaya Melanesia (Ase, 2018). Keterlibatan Indonesia ini menunjukkan usaha Indonesia dalam komunikasi strategis yang masih dilakukan ke kawasan Asia Pasifik Selatan khususnya rekan-rekan dari MSG.

2. *Bali Democracy Forum*

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia – setelah Amerika Serikat dan India – menginisiasi sebuah forum yang disebut *Bali Democracy Forum* (BDF). BDF diinisiasi sebagai wadah untuk bertukar pengalaman negara-negara yang sedang melakukan demokratisasi. Melalui BDF, Indonesia bisa menjadi aktor penting yang tidak hanya berpengaruh, tetapi juga berkontribusi dalam mempromosikan demokrasi di mata dunia. Sebagai elemen diplomasi, sudah selayaknya berbagai keberhasilan demokrasi dan HAM pada Indonesia diutilisasi secara optimal sehingga membangun citra positif Indonesia dan terutama untuk mencapai kepentingan nasional. Maka dari itu, acara ini digunakan untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Pasifik yang secara tidak langsung digunakan untuk menjawab tuduhan-tuduhan OPM. Dalam BDF, Indonesia

turut mengundang negara-negara MSG sebagai sebuah langkah pendekatan dan komunikasi untuk mengubah pemikiran negatifnya terhadap Indonesia.

Tidak hanya negara anggota MSG, Indonesia juga turut mengundang organisasi Sekretariat MSG pada BDF. Dari 2014 hingga 2019, tercatat setiap negara anggota MSG termasuk Sekretariat MSG selalu hadir dalam BDF kecuali Vanuatu yang baru hadir tahun 2014 dan 2018 saja (Lihat Tabel 3.1.).

Tabel 3.1. Kehadiran Anggota MSG dalam Bali Democracy Forum (2014-2019)

Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fiji	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papua Nugini	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kepulauan Solomon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vanuatu	✓	×	×	×	✓	×
Sekretariat MSG	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Rekapitulasi data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa kehadiran mereka memberikan konsekuensi yang memungkinkan negara anggota MSG mengurangi intensitas dukungan terhadap aktivis gerakan separatis Papua. Hal ini dikarenakan salah satu pembahasan dalam BDF ialah mengenai penguatan kapasitas demokrasi antar negara,

khususnya untuk memiliki komitmen yang tegas dalam menghargai kedaulatan antar negara. BDF menekankan pentingnya kesetaraan, dialog yang bersifat membangun, saling menghargai dan memahami untuk mencapai kerjasama demokrasi. Dengan demikian, Indonesia menjadi pemain penting dalam mempromosikan demokrasi di Asia Pasifik. Melalui BDF, Indonesia dapat memberi ruang komunikasi bagi MSG untuk saling berdiskusi dan melibatkan partisipasi kerjasama regional (Roziqi, 2020).

Kehadiran anggota-anggota MSG diiringi dengan apresiasi mereka atas undangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Fiji dan Papua Nugini mengapresiasi terselenggaranya forum yang mendorong diskusi dan mengunggah pemikiran yang berwawasan oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan Fiji dan Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu sangat mengapresiasi BDF yang memuji pemerintah Indonesia dengan karena mengadakan forum dan memberi kesempatan setiap negara untuk saling berbagi pengalaman demokrasi. Tidak hanya negara anggota MSG, tetapi Sekretariat MSG juga turut ikut hadir di BDF dan menyatakan apresiasinya atas kesempatan yang telah diberikan kepada MSG untuk semakin terlibat dalam kerjasama regional (Admin N. , 2018).

Dewasa ini, BDF merupakan salah satu elemen diplomasi publik Indonesia dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Diplomasi publik Indonesia ini dijadikan ajang unjuk gigi keadaan demokrasi dan HAM di Indonesia yang dimulai dari era SBY hingga era Jokowi saat ini. Meski BDF belum memiliki hasil kesepakatan yang terukur dikarenakan masih sebatas forum *sharing experience* bukan

forum untuk menghasilkan kesepakatan yang mengikat, BDF ini melahirkan konsekuensi moral, politik dan hukum bagi negara yang ikut hadir. Pelaksanaan BDF selanjutnya juga dapat membantu strategi diplomasi publik Indonesia dengan memberikan kesempatan MSG untuk semakin terlibat dalam kerjasama regional.

Hal ini terlihat saat BDF berperan sebagai sarana dalam mempertemukan dan meningkatkan hubungan negara anggota MSG. Seperti pada BDF VI tahun 2013, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat itu, secara khusus mengadakan pertemuan untuk negara anggota MSG yang hadir, yaitu Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon serta Sekretaris Jenderal MSG Peter Forau terkait dengan undangan kunjungan negara anggota MSG untuk melihat keadaan Indonesia secara langsung (Ministry of Communications of Fiji, 2013).¹⁵

Ataupun yang terbaru pada BDF XII tahun 2019, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di sela-sela BDF. Keduanya menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan (*Framework on Development Cooperation*) antara Indonesia-Kepulauan Solomon serta menyaksikan penandatanganan perjanjian hibah (*Grant Agreement*) Pembangunan Lapangan Futsal Multifungsi untuk pelaksanaan *Pacific Games 2023* di Kepulauan Solomon (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

¹⁵ Merujuk pada halaman 22.

Hal ini serupa dengan diadakannya pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato di sela-sela BDF XI tahun 2018. Indonesia dan Papua Nugini sepakat untuk meneruskan kerja sama dalam memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi. Kesepakatan ini bahkan ditanggapi dengan dukungan terbuka dari Papua Nugini terkait dengan Papua, bahwa:

“Tidak ada keraguan lagi bahwa Papua Nugini posisinya selalu konsisten jika menyangkut Papua dan Papua Barat. Kami tegas mendukung Indonesia dan ini menjadi dasar persahabatan yang muncul dari rakyat dan Pemerintah Indonesia” (Nugraha, 2018)

C. Membangun Relasi

Membangun relasi berarti menjalin hubungan jangka panjang dan memangkas jarak, sehingga diharapkan tidak ada jarak sosial antara aktor pelaku dan target dari diplomasi publik. Hubungan yang terjalin ini kemudian dapat menciptakan analisis umum terhadap sebuah isu dan dapat memberikan suatu pemikiran yang lebih jelas pada target yang dituju, terkait motivasi dan faktor aktor pelaku yang menyebabkan mereka melakukan suatu aksi dan diskusi ini akan berjalan di antara para aktor dengan latar yang berbeda. Berbagai kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam dimensi ini antara lain melalui pemberian beasiswa, pertukaran pelajar, kegiatan pelatihan (*training*), seminar atau konferensi, dan akses-akses saluran media lainnya (Leonard, 2002, p. 18).

Melihat dimensi ini, sebuah negara mengelola lingkungan internasionalnya dengan berbagai cara, salah satunya melalui usaha untuk menjalin sebuah kerjasama dengan negara-negara lainnya. Dalam rangka menjaga kestabilan regional dan negara, hal inilah yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan sebagai target diplomasi publiknya. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia antara lain kerjasama yang meliputi pemberian beasiswa dan juga kerjasama teknis dengan negara-negara anggota MSG.

1. Pemberian Beasiswa

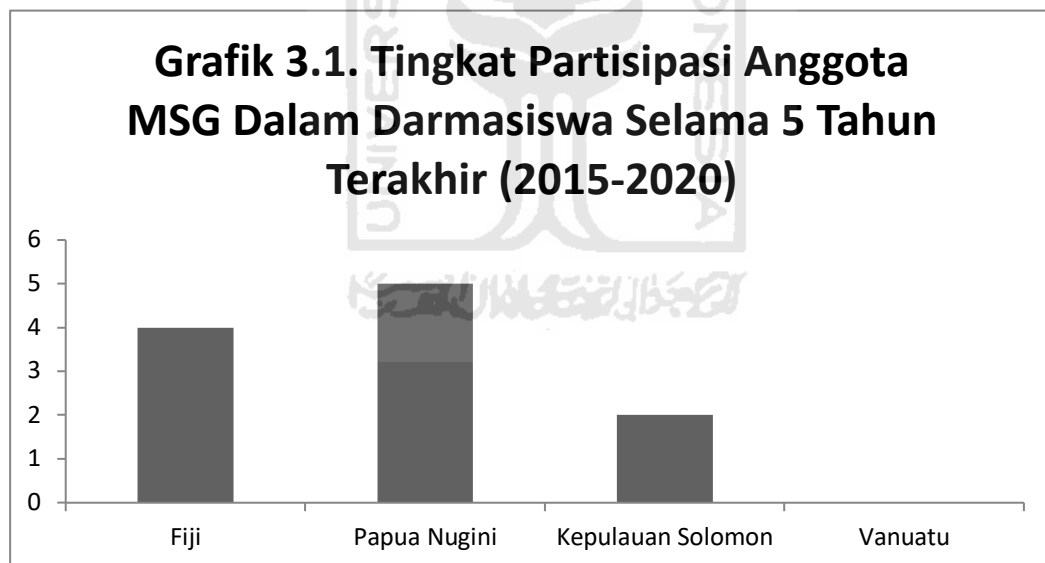
Indonesia melalui institusi pemerintahannya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Luar Negeri, telah berupaya memperkuat *soft power*-nya melalui diplomasi publik dalam bentuk beasiswa untuk memperkuat pengaruhnya menjadi aktor penting dalam percaturan politik di tingkat regional dan global. Pemberian beasiswa dan mobilitas pelajar internasional merupakan elemen penting dalam aktivitas diplomasi publik suatu negara. Hal ini terutama berkaitan dari tujuan program yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing untuk datang dan melihat secara langsung negara Indonesia dan mendapatkan kesan positif untuk kemudian disampaikan kembali ke negara mereka masing-masing. Beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing antara lain Darmasiswa, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) serta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI).

a. Darmasiswa dan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)

Darmasiswa merupakan program beasiswa yang dimulai pada tahun 1974 sebagai bagian dari inisiatif ASEAN dan awalnya hanya menerima mahasiswa dari kawasan ASEAN. Pada tahun 1976, Darmasiswa kemudian diperluas untuk mencakup mahasiswa asing dari negara lain seperti Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Hongaria, Jepang, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, dan Amerika Serikat. Pada awal 90-an, Darmasiswa kembali diperluas untuk mencakup semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Hingga saat ini, jumlah negara yang berpartisipasi dalam program ini adalah lebih dari 111 negara, termasuk negara-negara di Kepulauan Pasifik yang saat ini menjadi fokus pemerintah (Rahmi, 2015).

Darmasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menawarkan program beasiswa selama kurang lebih satu tahun kepada mahasiswa asing untuk mempelajari bahasa, seni dan budaya Indonesia di salah satu dari 72 perguruan tinggi dan universitas yang tersebar di Indonesia. Darmasiswa bertujuan untuk mempromosikan bahasa, seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Ini juga telah dirancang untuk memberikan hubungan budaya dan pemahaman yang lebih kuat di antara negara-negara yang berpartisipasi sekaligus menjadi salah satu strategi diplomasi publik Indonesia.

Berdasarkan rekapitulasi data yang didapat, selama lima tahun terakhir (2015-2020), tercatat bahwa Fiji telah berpartisipasi sebanyak 4 kali dengan total 6 mahasiswa; Papua Nugini sebanyak 5 kali dengan total 42 mahasiswa; Kepulauan Solomon sebanyak 2 kali dengan total 3 mahasiswa; dan Vanuatu nihil (lihat Grafik 3.1.). Berarti jumlah mahasiswa asing dari negara-negara anggota MSG yang menerima Darmasiswa ada 51 mahasiswa dimana 58,8% mengambil jurusan Bahasa Indonesia, 37,2% mengambil jurusan seputar *Art & Culture* (seperti *Culinary*, *Batik Arts*, *Martial Arts*, dll) dan sisanya sebesar 3,9% mengambil jurusan Pariwisata (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020).



Sumber : Rekapitulasi data dari <http://darmasiswa.kemendikbud.go.id/>

Grafik tersebut menunjukkan bahwa setidaknya dalam setiap tahun – dalam kurun waktu lima tahun terakhir – ada perwakilan mahasiswa asing penerima Darmasiswa dari negara anggota MSG dan hampir 60% dari para peserta menunjukkan ketertarikannya terhadap pemilihan studi Bahasa Indonesia. Para mahasiswa asing ini nantinya akan diberikan titel alumni seiring dengan berakhirnya program Darmasiswa dan juga ditempa untuk menjadi duta Bahasa dan Budaya Indonesia di negara asalnya.

Seperti di Papua Nugini, yang mana dalam kurun waktu lima tahun terakhir mempunyai partisipasi penuh dan jumlah mahasiswa terbanyak diantara lainnya, telah mendirikan *Indonesian Language and Multimedia Center* yang terletak di *St. Joseph's International Catholic College* dan *Indonesian Corner* di *Lions Morata Vocational Training Center*. Pada 2018, untuk pertama kalinya, Bahasa Indonesia juga resmi diajarkan secara formal di Sekolah Menengah Lae di provinsi Morobe, Papua Nugini, dengan gurunya Fred Ogia yang pernah studi dan lulusan dari UNIKOM, Bandung, Indonesia. (Wijaya & Wayne, 2018). Lalu di Fiji, alumni-alumninya selalu berpartisipasi dalam membantu dan mempromosikan budaya Indonesia di negara asalnya. Seperti penyelenggaraan “*Workshop on Batik and Bamboo Weaving*” oleh Kuasa Usaha Ad-interim (KUI) RI Suva dibantu oleh para alumni yaitu Katarina Ligaitamana dan Loraini Saqasaqivala, yang bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat Fiji.

Sedangkan dari Kepulauan Solomon, para alumninya berbagi cerita dan pengalaman seputar masa studinya di Indonesia. Seperti Erika Anderson, yang mengambil studi Bahasa Indonesia di Universitas Soedirman periode 2019/2020, menjelaskan bahwa Darmasiswa memberikan kesempatan terhadap dirinya untuk belajar menghormati, merangkul dan membangun ulang perspektifnya mengenai perbedaan dan keragaman budaya. Erika Anderson ingin berbagi dan meneruskan semua pengetahuan yang dipelajari selama masa studi di Indonesia ke negara asalnya dan berharap bahwa Darmasiswa dapat terus menjembatani dan mengapresiasi budaya antara Indonesia dan negara-negara yang berhubungan diplomatik di tahun-tahun selanjutnya (Universitas Soedirman, 2020). Untuk menekankan keberhasilan program ini agar dapat benar-benar terasa dan dirasakan semua pihak, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di setiap negara juga mengadakan forum alumni Darmasiswa RI secara berkala.

Pada umumnya, setelah menyelesaikan masa studi melalui Darmasiswa, para alumni yang berkeinginan lebih lanjut untuk studi di Indonesia akan mendaftarkan diri ke Beasiswa KNB. Beasiswa KNB merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu komunitas internasional untuk menghadapi tantangan sosial-ekonomi global. Beasiswa KNB awalnya bermula dari adanya kesadaran untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar dari negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) yang tercetus pasca Konferensi Kepala Negara GNB ke-10 pada tahun 1992,

pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993 membuka beasiswa program magister untuk pelajar dari negara anggota GNB.

Menyadari kontribusi program yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di negara anggota GNB, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperluas cakupan dan menambah jumlah beasiswa yang ditawarkan. Pemerintah Indonesia kemudian menawarkan beasiswa ini, tidak hanya ke negara anggota GNB, tetapi juga ke negara-negara berkembang termasuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan seperti Fiji, Papua Nugini, Solomon dan Vanuatu, sehingga beasiswa GNB digantikan menjadi beasiswa KNB.

Beasiswa KNB, yang sekarang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, menawarkan beasiswa program magister sebanyak 53 jurusan di 16 universitas terbaik di Indonesia. Selain berkontribusi pada pengembangan SDM negara berkembang, Beasiswa KNB juga bertujuan meningkatkan *cultural understanding* dan memperkuat hubungan serta kerja sama antara negara-negara berkembang. Sejak 2009 hingga 2017, Indonesia telah memberikan 992 beasiswa kepada siswa yang datang dari 71 negara berkembang di seluruh dunia (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017).

Kegiatan Darmasiswa dan Beasiswa KNB pada dasarnya merupakan bentuk upaya diplomasi yang positif untuk mengenalkan bahasa, seni, budaya dan toleransi Indonesia yang mengacu pada *Bhinneka Tunggal Ika* kepada masyarakat

internasional. Melalui *people-to-people-contact*, Indonesia berharap para alumni juga akan memperkenalkan keragaman Indonesia sehingga membuka jendela atau pemikiran masyarakat di negara asal tentang Indonesia yang dekat dengan mereka serta mau memberikan suara untuk Indonesia di masa mendatang. Hal ini terlihat saat Fiji dan Papua Nugini yang memberikan dukungan terbuka untuk Indonesia di forum-forum internasional yang dijelaskan di bab sebelumnya.

b. Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)

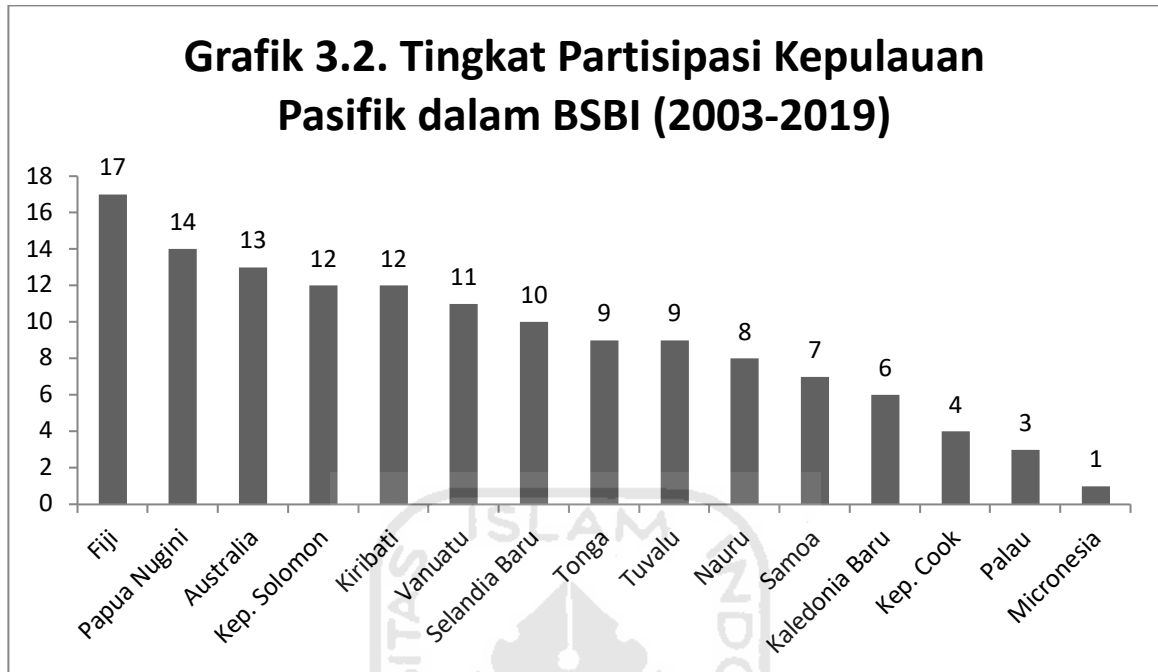
BSBI merupakan program beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dimana 72 peserta terpilih akan tinggal selama tiga bulan di tengah masyarakat Indonesia yang terbagi di enam kota yakni, Yogyakarta, Bali, Makassar, Padang, Kutai Kartanegara dan Banyuwangi. Para peserta akan belajar di sanggar seni dan budaya untuk mempelajari Bahasa Indonesia, seni budaya, adat istiadat dan kearifan lokal sesuai dengan kota yang ditempatkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

BSBI pertama kali diselenggarakan pada tahun 2003 dan difokuskan hanya kepada negara-negara Kepulauan Pasifik saja. BSBI diberikan kepada 12 peserta yang berasal dari negara-negara anggota *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD) yaitu Australia, Fiji, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru dan Timor Leste. Melihat potensi BSBI, pemerintah Indonesia kemudian ingin mengembangkan diplomasi publiknya ke negara-negara lainnya dengan tujuan untuk memudahkan Indonesia

dalam memperoleh hubungan kerjasama antar negara lainnya. Pada tahun selanjutnya, BSBI kemudian diperluas cakupannya mulai dari negara anggota SwPD, ASEAN+3, PIF, MSG hingga negara-negara di benua Asia, Afrika, Amerika dan Eropa.

Guna meningkatkan *people-to-people-contact*, Indonesia juga melibatkan peserta yang berasal dari lima pulau terbesar Indonesia. Melalui *people-to-people-contact* membuat interaksi antar peserta semakin intensif sehingga terjadi pertukaran kebudayaan diantara delegasi kebudayaan dalam membina hubungan satu sama lain. Hal ini kemudian memungkinkan peserta masing-masing mengetahui pandangan satu sama lain dengan cara yang damai (Roziqi, 2020). Pada akhirnya program menjadi sarana untuk menumbuhkan kerjasama, yang muncul dari kontak langsung dan berbagi budaya di antara orang-orang yang terlibat dalam program, yang mengarah ke hubungan diplomatik yang berkembang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, BSBI menjadi alat baru bagi diplomasi Indonesia dengan menggunakan seni dan budaya.

Sejak 2003, negara-negara di Kepulauan Pasifik cenderung aktif dalam berpartisipasi dan juga memiliki jumlah peserta yang cenderung stabil. Hal ini melihat awal tujuan program BSBI yang memang difokuskan kepada negara-negara di Kepulauan Pasifik. Berdasarkan rekapitulasi data dari Kementerian Luar Negeri, kawasan Pasifik merupakan kawasan dengan partisipasi tertinggi sebanyak 136 kali dari 15 negara (2003-2019) setelah kawasan Asia (Lihat Grafik 3.2).



Sumber : Rekapitulasi data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Grafik tersebut menunjukkan Fiji yang tidak pernah absen sejak BSBI pertama kali diselenggarakan hingga BSBI paling terbaru tahun 2019 yang telah menghasilkan 57 alumnus disana. Di peringkat kedua ada Papua Nugini dengan partisipasi sebanyak 14 kali, peringkat keempat ada Kepulauan Solomon bersama Kiribati dengan partisipasi sebanyak 12 kali dan peringkat kelima yaitu Vanuatu dengan partisipasi 11 kali. Rata-rata peserta yang dikirimkan oleh Fiji berjumlah 3-4 orang sedangkan Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu berjumlah 1-2 orang.

Stabilnya partisipasi negara anggota MSG dari awal sayangnya tidak diiringi dengan partisipasi dari perwakilan Indonesia Timur khususnya yang mewakili Melanesia. Dari 2003 hingga 2015, hanya ada tiga kali partisipasi yang berasal dari Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur saja. Baru pada 2016, pemerintah berusaha

meningkatkan keikutsertaan peserta BSBI asal Indonesia Timur, khususnya lima provinsi yang mewakili etnis Melanesia yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini terlihat dalam kurun waktu empat tahun terakhir dimana selalu ada perwakilan dari Indonesia Timur (Lihat Tabel 3.2.)

Tabel 3.2. Peserta BSBI dari Indonesia (2015-2019)

Tahun	Indonesia Barat	Indonesia Tengah	Indonesia Timur	Total
2015	Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sumatra Utara	Kalimantan	-	5 orang
2016	Jawa Timur, Jawa Barat	-	Papua Barat, NTT	4 orang
2017	Jawa Timur	Sulawesi Tengah, Kalimantan	Papua	4 orang
2018	DKI Jakarta, Yogyakarta, Bengkulu	-	Papua Barat, Maluku	5 orang
2019	Yogyakarta, Jawa Tengah	Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur	Papua Barat, NTT	6 orang

Sumber : Rekapitulasi data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Peningkatan jumlah peserta Indonesia Timur ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk membuka lebih banyak kesempatan dalam mengenalkan kebhinnekaan Indonesia kepada masyarakat global, yang mana merupakan tujuan dasar dari program BSBI. Pendekatan melalui pendidikan ini dilakukan dalam rangka menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan Indonesia yang menjadikan para peserta sebagai agen budaya. Kementerian Luar Negeri RI

berharap rasa cinta terhadap Indonesia akan membuat para peserta melestarikan budaya Indonesia dan membagikan cerita positif serta segala pengetahuan yang telah dipelajari selama masa program ke negara asalnya masing-masing. Dengan begitu, secara tidak langsung, BSBI bisa mengurangi atau mencegah munculnya klaim negara lain terhadap seni dan budaya Indonesia. Dan yang terpenting, BSBI dapat menciptakan pandangan baik masyarakat dunia kepada Indonesia melalui seni dan budaya (Roziqi, 2020).

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Dubes Esti Handayani, menyatakan bahwa, pada 2016, alumni BSBI dari Indonesia membentuk *Association of Indonesian Arts and Culture Scholarship Alumni* yang bertujuan untuk memberdayakan para alumni BSBI dalam memperkuat pemahaman budaya, *people-to-people-contact*, dan mempromosikan Indonesia di negara-negara asal alumni (Shihab, 2016). Pada umumnya, setelah program berakhir, para alumnus akan diundang di acara-acara seputar Indonesia atau KBRI setempat, mulai dari sebagai pembicara hingga menunjukkan karya seni, tarian, alat musik dan lagu Indonesia. Tidak hanya itu, para alumnus juga membuat karya pribadi atau mengenalkan budaya Indonesia secara personal di negaranya masing-masing.

Seperti alumni BSBI dari Fiji yang membentuk kelompok tari yang disebut “Rako Pasifika” dan “Vou” yang tujuannya untuk memperkenalkan tarian Indonesia dan juga alumni Christine Nikola May yang menulis buku berjudul “*Way to Indonesia*” (Admin, 2017). Ataupun alumni dari Papua Nugini, Vincent Lagea, yang membuat

lagu “Indonesiaku” yang hingga saat ini dipakai menjadi pengiring di setiap pembukaan acara BSBI. Ini merupakan langkah Indonesia untuk berdiplomasi publik dan termasuk untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui orang-orang yang menerima beasiswa ini di kawasan Pasifik.

2. Kerjasama Teknis

Bagi Indonesia, kerjasama teknis merupakan salah satu cara dan sarana dalam meningkatkan kemitraan antar negara dan adalah bagian integral dari kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri merupakan refleksi dari politik dalam negeri dan bersumber pada kepentingan nasional. Beberapa tahun terakhir, negara-negara di Pasifik Selatan telah menjadi prioritas pemberian kerjasama teknis yang tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019, dimana salah satunya difokuskan kepada penjagaan integritas wilayah Indonesia (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Isu yang terkait dengan integritas NKRI dewasa ini adalah peningkatan aktivis-aktivis gerakan separatis Papua yang memanfaatkan kedekatan etnis Melanesia kepada negara-negara Pasifik untuk meraih dukungan politik dan menjadikan negara-negara tersebut sebagai basis pergerakannya.

Oleh karena itu, Indonesia berupaya menumbuhkan hubungan baik dalam rangka meraih simpati politik negara-negara di Asia Pasifik Selatan melalui kerjasama seperti Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). KSST adalah

pengembangan dari Kerjasama Selatan-Selatan yang merupakan kerjasama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan dan saling menguntungkan (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017). Dalam implementasinya, KSST lebih lazim digunakan di Indonesia untuk merujuk pada semua kegiatan kerjasama pembangunan, baik yang bersifat bilateral (Kerjasama Selatan-Selatan) maupun yang melibatkan tiga pihak yaitu negara atau lembaga mitra pembangunan, Indonesia, dan negara penerima manfaat (KSST) (Pujayanti, 2015).

Dalam KSST, jenis bantuan yang diberikan oleh Indonesia sebagian besar bukan dalam bentuk dana melainkan berupa bantuan teknis seperti pemberian program pengembangan kapasitas, program pelatihan, bantuan alat-alat dan dalam bentuk-bentuk lainnya. Hingga tahun 2014, Pemerintah RI telah memberikan 224 pengembangan kapasitas atau *capacity building* untuk negara-negara Pasifik Selatan dan mayoritas penerima bantuan tersebut berasal dari Papua Nugini (148 peserta), Solomon Islands (33 peserta), Fiji (542 peserta), Vanuatu (35 peserta), Palau (23 peserta), Tuvalu (9 peserta) dan Tonga (19 peserta) (Rahmi, 2015). *Capacity building* untuk wilayah Pasifik Selatan ini ditujukan untuk memajukan demokrasi, membantu dalam bidang perikanan, pertanian dan lain sebagainya, pelaksanaannya yaitu dengan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusia.

Seperti pada 2016, Indonesia menyelenggarakan pelatihan (*training*) produk kelapa bagi 12 negara diantaranya termasuk Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Pelatihan juga diikuti oleh masyarakat lokal yang berasal dari Sulawesi Utara dan empat provinsi Melanesia di Indonesia yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, dengan tujuan untuk memperkenalkan etnis Melanesia Indonesia kepada negara-negara Melanesia lainnya serta sebagai jembatan konektivitas Indonesia dengan negara-negara Pasifik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).

Selain *training*, ada juga program berbentuk *workshop* yaitu “*International Workshop on Protocol and Conference Management for Melanesian Spearhead Group Secretariat and the Republic of Fiji 2016*” yang diikuti peserta dari Sekretariat MSG dan Kementerian Luar Negeri Fiji. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bantuan senilai 20 juta dollar dari pemerintah Indonesia ke negara-negara Pasifik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).¹⁶ Ada juga program pengiriman tenaga ahli atau *dispatch experts* seperti “*Dispatch Experts on Seaweed for Solomon Islands*” di Honiara, Kepulauan Solomon, tahun 2019 (Direktorat Kerjasama Teknik, 2020).

Sebagai negara kepulauan, negara-negara di kawasan ini mendapat program seputar manajemen wilayah pesisir, hutan *mangrove*, aktivitas pariwisata dari usaha kecil dan menengah serta proyek-proyek pembangunan wilayah kelautan dan

¹⁶ Merujuk pada halaman 31 dimana komitmen tersebut pernah disampaikan pada pertemuan PIDF.

perikanan. Di Fiji, pelatihan di bidang pengolahan biota laut dan pengolahan ikan sejak tahun 2010 telah banyak dilaksanakan oleh Indonesia. Di Kepulauan Solomon, pada 2017 dilaksanakan program lanjutan dari “*Pilot Project On Seaweed Product Development For Solomon Island 2014*” untuk pelatihan budi daya dan pengolahan hasil berbahan dasar rumput laut bagi masyarakat setempat (Wulandari, 2017). Ada juga pelatihan “*International Training Program on Fisheries Product Processing and Seashell Handicraft Making for MSG Countries*” dalam memanfaatkan limbah sampah hasil laut menjadi nilai ekonomis juga diikuti oleh peserta dari Fiji, PNG dan Kepulauan Solomon (Rahmi, Mengubah Sampah Menjadi Indah, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya yang memprioritaskan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai penerima bantuan KSST. Pada 2017, Indonesia pernah memberikan bantuan berupa alat-alat seperti alat traktor untuk meningkatkan produktivitas pertanian di negara Fiji dan Vanuatu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017). Indonesia juga turut memberikan bantuan kemanusiaan, terutama di saat negara-negara di kawasan ini dilanda bencana alam, sebagai bentuk solidaritas sebagai warga dunia dan bangsa Pasifik.¹⁷ Selain itu, di tahun 2019, Indonesia meresmikan “*Indonesia AID*” yang diadopsi sebagai perangkat diplomasi untuk memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional. *Indonesia AID* merupakan program bantuan luar negeri Indonesia yang rencananya akan menyisihkan dana dalam dana abadi yang

¹⁷ Merujuk pada halaman 32.

akan didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan di Kepulauan Pasifik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia , 2019).

Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program dalam bidang pengembangan usaha, yaitu *“International South Pacific - Indonesia Entrepreneurship Camp: Sharing Experience to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) 2019”* yang ditujukan kepada 21 pelaku bisnis dari negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Indonesia juga melaksanakan *“Pacific Exposition 2019”* yang bertujuan untuk menguatkan kolaborasi pariwisata dan bisnis diantara negara-negara Pasifik, termasuk diantaranya Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Bantuan-bantuan dibawah kerangka KSST tersebut membuka peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan perannya di dunia internasional maupun kawasan regional, khususnya di Asia Pasifik Selatan. Kerjasama ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam implementasi wujud kebijakan luar negerinya terhadap hubungan dengan Asia Pasifik Selatan. Indonesia berupaya mengembangkan konektivitas di kawasan Pasifik Selatan sebagai usaha mendapat dukungan dari negara-negara di kawasan ini dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari aktivis-aktivis gerakan separatis Papua.

D. Tujuan Strategi Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Kawasan Asia Pasifik Selatan

Setelah dimensi-dimensi tersebut dijalankan maka selanjutnya akan mendapatkan sebuah hasil/tujuan dari diplomasi publik tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Mark Leonard bahwa terdapat empat tujuan yang dapat dicapai dengan adanya diplomasi publik: (1) adanya peningkatan rasa kekeluargaan masyarakat dari negara lain dengan Indonesia; (2) peningkatan penghargaan masyarakat dari negara lain terhadap Indonesia; (3) pelibatan masyarakat dari negara lain dengan program/aktivitas yang diseleenggarakan Indonesia; dan (4) mempengaruhi masyarakat dari negara lain.

Dalam dinamikanya, selama dijalankannya diplomasi publik ini, penulis menilai bahwa Indonesia telah mencapai pada tahap terakhir, walaupun sebenarnya belum seratus persen sepenuhnya tercapai. Tahap pertama ditandai dengan terpenuhinya indikator seperti meningkatnya pengetahuan publik Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini tentang Indonesia serta adanya perbaikan citra, opini, informasi dan persepsi negatif Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui publikasi di berbagai media massa yang telah dijelaskan pada dimensi manajemen berita dan pengembangan narasi bahwa ras Melanesia di Indonesia bukan hanya etnis Papua tetapi juga mencakup etnis Maluku dan Timor (NTT) melalui Festival Melanesia dan BDF pada dimensi komunikasi strategis. Selain itu, kegiatan diplomasi publik Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mencapai tahapan ini adalah

termasuk bergabungnya Indonesia dalam MSG dimana secara langsung memperkenalkan Indonesia kepada anggota-anggota MSG.

Pada tahap kedua, dalam meningkatkan persepsi yang positif dari masyarakat negara yang dituju, upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia adalah dengan memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan kemanusiaan terhadap Vanuatu dan Fiji setelah dilanda angin topan, ataupun bantuan berupa program pengembangan kapasitas, program pelatihan ataupun bantuan alat-alat kepada Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini dibawah kerangka KSST. Bantuan luar negeri tersebut menitikkan pesan bahwa Indonesia memiliki rasa kepedulian dan solidaritas terhadap negara-negara dengan rumpun Melanesia. Meski begitu, sebenarnya persepsi dari Vanuatu tentang Papua belum berubah menjadi positif meskipun strategi manajemen berita dan komunikasi strategis telah diupayakan Indonesia. Upaya mengubah persepsi mengenai isu Papua lantas menjadi tantangan sendiri dalam implementasi diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu kedepannya.

Pencapaian diplomasi publik Indonesia pada tahap ketiga yaitu pelibatan masyarakat negara tujuan dalam aktivitas yang diselenggarakan pemerintah dapat dilihat melalui dimensi pembangunan relasi. Pada tahap ini dapat dilihat melalui pemeberian beasiswa yang konsisten terhadap Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini seperti Darmasiswa, KNB dan BSBI. Selain itu ada juga berbagai program pelatihan kerjasama teknis seperti pelatihan dan *workshop* yang ditujukan untuk negara-negara Pasifik Selatan. Pada tahap ini menghasilkan peningkatan kerja

sama di berbagai bidang dan pengenalan Indonesia lebih jauh lewat pendidikan dan pariwisata.

Pada tahap terakhir yaitu keberhasilan dalam mempengaruhi masyarakat di negara sasaran, penulis menilai bahwa pencapaian dalam tahapan ini belum sepenuhnya tercapai. Pencapaian hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini dapat dilihat dari peningkatan kerjasama yang telah terjalin di berbagai bidang serta partisipasi konsisten dari masing-masing negara terhadap program/aktivitas yang diselenggarakan Indonesia. Pencapaian dalam tahapan ini dapat dibuktikan dengan dukungan terbuka dari Papua Nugini dan Fiji di forum-forum terbuka serta dipromosikannya status Indonesia dari *observer* menjadi member asosiasi dalam MSG dan penangguhan penerimaan anggota pro-kemerdekaan Papua.

Meski begitu, Vanuatu tetap menunjukkan kecenderungan untuk mendukung upaya memerdekakan Papua yang dapat dilihat dalam sejumlah forum seperti MSG PIF dan PBB yang masih mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua yang menyudutkan Indonesia. Dengan adanya kecenderungan ini, penulis menilai bahwa dari keempat tahap pencapaian diplomasi publik diatas, terlihat bahwa strategi diplomasi Indonesia baik melalui manajemen berita, komunikasi strategis maupun pembangunan relasi terhadap masyarakat Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan Papua Nugini belum sepenuhnya mampu membuat publik Vanuatu memihak dan mendukung sikap politik Indonesia. Namun, hal ini bukan berarti strategi diplomasi

publik yang dijalankan Indonesia gagal. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa negara-negara sasaran selain Vanuatu, secara konsisten memberikan dukungan terbuka kepada Indonesia. Selain itu, strategi diplomasi publik Indonesia masih berjalan selama masih adanya hubungan diplomatik dan juga kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sasaran.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam tujuan yang lebih luas, strategi diplomasi publik Indonesia ditujukan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan negara-negara lainnya. Namun dalam kasus ini, strategi diplomasi publik ditujukan khusus untuk membendung upaya OPM dalam mencari simpati politik dari negara anggota MSG. Dengan menggunakan konsep diplomasi publik oleh Mark Leonard, penulis menganalisa bagaimana Indonesia melakukan diplomasi publik terhadap negara anggota MSG terkait OPM, dengan mengklasifikasi langkah pemerintah Indonesia menjadi beberapa dimensi, yaitu manajemen berita, komunikasi strategis dan pembangunan relasi serta keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada dimensi pertama, strategi diplomasi publik Indonesia dapat dilihat dari bagaimana Indonesia memanfaatkan media massa dalam manajemen berita. Melalui media massa, Indonesia menyebarkan bantahan-bantahan dan menyampaikan sejumlah keberhasilan yang telah dibangun di Papua. Bahkan, Indonesia juga meliris sebuah laporan berisi statistik dan fakta-fakta kondisi di Papua sebagai bantahan atas tuduhan OPM. Dimensi ini berguna untuk meluruskan informasi dan persepsi yang telah dibangun oleh OPM terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan.

Pada dimensi kedua, setelah meluruskan kesalahan informasi dan persepsi terkait Papua, pemerintah Indonesia kemudian mencoba mengembangkan narasi baru. Bahwa ras Melanesia di Indonesia bukan hanya ada di pulau Papua saja tetapi juga di Maluku dan Timor melalui acara *Melanesian Culture Festival* dan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM melalui *Bali Democracy Forum*. Dimensi kedua ini berguna untuk melawan persepsi OPM yang memanfaatkan kedekatan identitas Melanesia dan pelanggaran HAM untuk mencari dukungan dari negara-negara Melanesia.

Pada dimensi terakhir, dengan memanfaatkan instrumen kerjasama, Indonesia mencoba membangun relasi jangka panjang dengan negara anggota MSG. Melalui pemberian beasiswa dan KSST, diharapkan terjadinya peningkatan citra Indonesia yang positif di mata dunia, khususnya negara-negara di Asia Pasifik Selatan. Hal ini dikarenakan pada dimensi ini digunakan *people-to-people-contact* atau melibatkan masyarakat secara langsung serta menjadi alat diplomasi untuk menunjukkan seni, budaya dan sisi Indonesia yang positif untuk mencari teman dan dukungan di forum tingkat dunia terkait OPM.

Setelah dimensi-dimensi tersebut dijalankan maka selanjutnya akan mendapatkan sebuah hasil/tujuan dari diplomasi publik tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Mark Leonard bahwa terdapat empat tujuan yang dapat dicapai dengan adanya diplomasi publik: (1) adanya peningkatan rasa kekeluargaan masyarakat dari negara lain dengan Indonesia; (2) peningkatan penghargaan masyarakat dari negara lain terhadap

Indonesia; (3) pelibatan masyarakat dari negara lain dengan program/aktivitas yang diseleggarakan Indonesia; dan (4) mempengaruhi masyarakat dari negara lain.

Satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa diplomasi publik merupakan strategi politik jangka panjang dan bukan sesuatu hal yang dapat dituai secara cepat apalagi instan. Mungkin dalam kurun waktu lima tahun terakhir ada beberapa keberhasilan yang diraih oleh Indonesia seperti penangguhan keanggotaan gerakan separatis Papua di MSG ataupun dukungan terbuka dari Fiji dan Papua Nugini di forum-forum tingkat regional dan dunia. Namun potensi dan peluang diplomasi publik Indonesia terhadap negara-negara Asia Pasifik Selatan masih terbuka lebar karena kembali lagi pada dasar dari diplomasi publik yang merupakan diplomasi jangka panjang.

B. Saran

Dinamis dan terbuka merupakan sifat alami dari ilmu pengetahuan. Pada penelitian yang terfokus pada strategi diplomasi Indonesia terhadap negara-negara di Asia Pasifik Selatan ini, penulis menyadari masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk menambah lebih banyak khazanah ilmu pengetahuan kedepannya.

Melalui penelitian ini, penulis berharap bahwa strategi diplomasi Indonesia tidak hanya dilakukan oleh aktor negara saja seperti pemerintah, tetapi juga aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah dapat ikut serta mendukung dan terlibat. Akhir kata, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat kepada

pembaca dan masyarakat Indonesia sebagai pengetahuan dan informasi seputar diplomasi publik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulsalam, H. (2019, February 6). *Siapa Kawan dan Lawan Indonesia di Melanesia Soal Papua Merdeka?* Retrieved August 4, 2020, from Tirto: <https://tirto.id/siapa-kawan-dan-lawan-indonesia-di-melanesia-soal-papua-merdeka-df4R>

Admin. (2017, October 11). *Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Menyebarkan Budaya Toleransi Untuk Dunia yang Damai*. Retrieved October 4, 2020, from Tabloid Diplomasi: <http://www.tabloiddiplomasi.org/beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia-menyebarkan-budaya-toleransi-untuk-dunia-yang-damai/>

Ali, A. (2020, March 16). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Sebesar 64,70*. Retrieved September 20, 2020, from Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat: <https://papuabarot.bps.go.id/pressrelease/2020/03/16/577/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-barat-tahun-2019-sebesar-64-70.html>

Alta, A., & Pamaswi, R. M. (2018, February). Indonesian South-South Cooperation: Stepping Up the Institution and Strategy for Indonesia's Development Assistance. *LPEM-FEB UI Working Paper 017*, pp. 1-10.

Anya, A. (2019, January 31). *RI condemns Vanuatu for including Papuan in delegation*. Retrieved July 1, 2020, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/31/ri-condemns-vanuatu-including-papuan-delegation.html>

AP. (2019, December 2). *Jejak OPM di Tangan Wenda Bersaudara*. Retrieved June 30, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191202092429-106-453258/jejak-opm-di-tangan-wenda-bersaudara>

Ase, I. (2018, July 7). *Partisipasi Indonesia di MACFEST 2018, Festival Melanesia di Honiara Solomon Islands*. Retrieved September 28, 2020, from Kompas: <https://www.kompasiana.com/aseissacc/5b40252716835f277230b4c2/indonesia-di-macfest-ke-2018-honiara-solomon-islands>

Aualiitia, T. (2016, September 29). *Indonesia accuses Pacific nations of 'misusing' the United Nations assembly after Papua criticisms*. Retrieved July 27, 2020, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2016-09-26/indonesia-pacific-islands-spar-at-un-over-human-rights-autonomy/7878292>

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Reorientasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular bagi Kepentingan*

Nasional. Retrieved October 5, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW41MjBCUFBLL1AzSzIlMjBBU1BBU0FGLzA4X1Jlb3JpZW50YXNpX0tldmFhX1NhbWFfU2VsYXRhbi1TZWxhdGFuX2Rhbl9Ucmllbmd1bGFiX2JhZ2lfs2VwZW50aW5nYW5fTmFzaW9uYWwucGRm>

Bernama, A. (2016, July 12). *Negative Propaganda of Papua*. Retrieved September 15, 2020, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2016/07/12/negative-propaganda-papua.html>

Blades, J. (2016, September 27). *Indonesia accuses Pacific countries of interference*. Retrieved July 1, 2020, from RNZ: <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/314234/indonesia-accuses-pacific-countries-of-interference>

Blades, J. (2018, September 6). *Indonesia Proposes Funding Papua Diplomacy in Pacific*. Retrieved August 2, 2020, from RNZ: <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/365836/indonesia-proposes-funding-papua-diplomacy-in-pacific>

Blades, J. (2016, September 26). *Pacific Leaders Raise West Papua at the UN*. Retrieved July 27, 2020, from RNZ: <https://www.rnz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/201817600/pacific-leaders-raise-west-papua-at-the-un>

Blades, J. (2020, May 1). *West Papua, The Issue That Won't Go Away for Melanesia*. Retrieved July 6, 2020, from Lowy Institute: <https://www.loyyinstitute.org/publications/west-papua-issues-wont-go-away-melanesia>

Bonasir, R. (2019, November 11). *Upaya internasionalisasi Papua: 'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia'*. Retrieved September 8, 2020, from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498660>

Budiarjo, P. M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Cullwick, J. (2013, July 8). *Vanuatu PM Made Strong Stand For West Papua, Kanaks At MSG*. Retrieved June 30, 2020, from Pacific Island Report: <http://www.pireport.org/articles/2013/07/08/vanuatu-pm-made-strong-stand-west-papua-kanaks-msg>

Direktorat Kerjasama Teknik. (2020). *Laporan Kinerja Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Doherty, B. (2019, August 12). *Indonesia anger as West Papua independence raised at Pacific forum*. Retrieved July 20, 2020, from The Guardian:

<https://www.theguardian.com/world/2019/aug/12/indonesia-angered-as-west-papua-independence-raises-its-head-at-pacific-forum>

Elmslie, J. (2015). Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenges and Opportunities. In R. Azizian, & C. Cramer, *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania* (p. 107). Hawaii: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies.

Erdianto, K. (2018, February 2). *Dua Negara di Pasifik Selatan Dukung Pembangunan dan Penegakan HAM di Papua*. Retrieved August 20, 2020, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/06450821/dua-negara-di-pasifik-selatan-dukung-pembangunan-dan-penegakan-ham-di-papua?page=all>

Fadhillah, M. (2019). Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini. *Indonesian Perspective Vol. 4, No. 1*, 60.

Firmansyah, T. (2018, February 15). *MSG Tolak Keinginan Separatis Papua Jadi Anggota Penuh*. Retrieved August 1, 2020, from Republika: <https://republika.co.id/berita/internasional/asia/18/02/15/p470gj377-msg-tolak-keinginan-separatis-papua-jadi-anggota-penuh>

Ginting, E., Raja, S., Harlianto, Wahono, Hardiwinangun, F. H., & Adenan, M. R. (2011). *Speeches and Proceedings Bali Democracy Forum III*. Jakarta : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Humas. (2015, May 12). *Kunjungi Port Moresby, Presiden Jokowi Sebut Papua Nugini Sebagai Tetangga Penting*. Retrieved August 23, 2020, from Sekretariat Kabinet RI: <https://setkab.go.id/kunjungi-port-moresby-presiden-jokowi-sebut-papua-nugini-sebagai-tetangga-penting/>

Ihsanuddin. (2019, October 18). *Paparan Moeldoko soal Keberhasilan Jokowi-Kalla Bangun Papua dan Papua Barat*. Retrieved September 22, 2020, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/19484061/paparan-moeldoko-soal-keberhasilan-jokowi-kalla-bangun-papua-dan-papua-barat?page=all>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017, April 13). *Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia sebagai Wadah Memajukan Kebudayaan Nasional*. Retrieved September 27, 2020, from Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/13984/forum-persaudaraan-masyarakat-melanesia-sebagai-wadah-memajukan-kebudayaan-nasional>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia . (2019, October 18). *Diplomasi Tangan Di Atas: Indonesia Aid, Waktunya Indonesia Makin Berkontribusi Pada Dunia*. Retrieved

October 9, 2020, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/diplomasi-tangan-di-atas-indonesia-aid-waktunya-indonesia-makin-berkontribusi-pada-dunia/>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, August 14). *“Indonesia Channel: Mosaic of Indonesia” Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2019*. Retrieved October 3, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/527/berita/indonesia-channel-mosaic-of-indonesia-beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia-bsbi-2019>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, August 27). *Banyak Bukti Kesamaan Tunjukkan Indonesia Adalah Bagian Dari Pasifik*. Retrieved September 26, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/wellington/id/news/8262/banyak-bukti-kesamaan-tunjukkan-indonesia-adalah-bagian-dari-pasifik>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, April 5). Bersama Indonesia Menjadi Tuan Rumah Konferensi Internasional. *Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* , pp. 10-11.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, April 5). Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Peran Kerjasama Teknik Bagi Penguatan Diplomasi Ekonomi* , p. 1.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, December 5). *Kemitraan Indonesia-Kepulauan Solomon Semakin Meningkatkan di Kawasan Pasifik*. Retrieved October 11, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/870/view/kemitraan-indonesia-kepulauan-solomon-semakin-meningkat-di-kawasan-pasifik>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2014). Melanesian Spearhead Group (MSG). In *Diplomasi Indonesia 2014* (p. 161). Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, 4 8). *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Retrieved 7 14, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/i/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, April 5). Pengetahuan Produk Kelapa Untuk Sahabat di Asia Pasifik. *Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* , pp. 12-13.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, July 11). *Semua Berawal dari Persahabatan: Melalui Pacific Exposition 2019, RI Ciptakan Momentum Pasifik*. Retrieved October 8, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/450/berita/semua-berawal-dari-persahabatan-melalui-pacific-exposition-2019-ri-ciptakan-momentum-pasifik>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015, October 25). *Kacung Marijan Sampaikan Isi Kesepakatan "Kupang Message"*. Retrieved September 27, 2020, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/kacung-marijan-sampaikan-isi-kesepakatan-kupang-message/>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015, October 29). *Mendikbud: Mari Rayakan Kebhinekaan antar Masyarakat Ras Melanesia*. Retrieved September 2020, 2020, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/10/mendikbud-mari-rayakan-kebhinekaan-antar-masyarakat-ras-melanesia---4768-4768-4768>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015, October 30). *Festival Budaya Melanesia 2015*. Retrieved September 27, 2020, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/festival-budaya-melanesia-2015/>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *List of Participants Darmasiswa Scholarship Program Academic Year 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020*. Retrieved October 2, 2020, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: <http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015, Oktober 29). *RINGKASAN LAPORAN KONFERENSI INTERNASIONAL MELANESIA 2015*. Retrieved September 27, 2020, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ringkasan-laporan-konferensi-internasional-melanesia-2015/>

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2017). *KNB Scholarship Application Guidance*. Retrieved October 1, 2020, from Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia: http://www.knb.ristekdikti.go.id/lib/file/KNB_applicationguidance_2017_new.pdf

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017, March 20). *Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia*. Retrieved October 5, 2020, from Indonesia South-South Technical Cooperation: <https://isstc.setneg.go.id/index.php/component/content/article/7-newsletter/219-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular-indonesia>

Kurnia, M. (2016). THE INDONESIAN ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP AS AN INSTRUMENTALITY OF CULTURAL DIPLOMACY INDONESIA . *Transformasi Vol. 1 No. 29* , 35-40.

Leonard, M. (2002). *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre.

Maclellan, N. (2013, June 18). *MSG to Send Mission to Jakarta and West Papua*. Retrieved July 3, 2020, from Scoop World: <https://www.scoop.co.nz/stories/WO1306/S00444/msg-to-send-mission-to-jakarta-and-west-papua.htm>

Maclellan, N. (2016, September 26). *West Papua High on Pacific Islands Forum Agenda*. Retrieved July 21, 2020, from The Lowy Institute: <https://www.loyyinstitute.org/the-interpretor/west-papua-high-pacific-islands-forum-agenda>

Merdiana, E. (2020, February 17). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2019*. Retrieved September 20, 2020, from Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/483/indeks-pembangunan-manusia-ipm-provinsi-papua-tahun-2019.html>

Ministry of Communications of Fiji. (2013, November 07). *FIJIAN FOREIGN MINISTER ADDRESSES GLOBAL LEADERS AT BALI FORUM*. Retrieved October 12, 2020, from The Fijian Government: <https://www.fiji.gov.fj/Media-Centre/News/FIJIAN-FOREIGN-MINISTER-ADDRESSES-GLOBAL-LEADERS-A>

Nugraha, F. (2018, December 6). *Papua Nugini Tegaskan Kembali Papua Bagian Indonesia*. Retrieved October 10, 2020, from Medcom.id: <https://www.medcom.id/internasional/asia/0Kvq969k-papua-nugini-tegaskan-kembali-papua-bagian-indonesia>

Nursalikhah, A. (2015, April 4). *Indonesia Kirim Bantuan dan Tim Kemanusiaan ke Vanuatu*. Retrieved August 4, 2020, from Republika: <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/04/04/nm9v73-indonesia-kirim-bantuan-dan-tim-kemanusiaan-ke-vanuatu>

Pacific Islands Forum Secretariat. (n.d.). *West Papua (Papua)*. Retrieved July 16, 2020, from Pacific Islands Forum Secretariat: <https://www.forumsec.org/west-papua/>

Permana, R. H. (2020, September 28). *Lengkap, Ini Jawaban Tegas Silwany Pasaribu untuk Vanuatu di Sidang PBB*. Retrieved September 29, 2020, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-5191778/lengkap-ini-jawaban-tegas-silwany-pasaribu-untuk-vanuatu-di-sidang-pbb/2>

Pujayanti, A. (2015). KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN MANFAATNYA BAGI INDONESIA. *Politica Vol. 6 No. 1* , 63-86.

Putra, G. N., Legionosuko, T., & Majid, A. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara-Negara Anggota MSG Dalam Menghadapi Propaganda OPM: Studi Kasus Negara Republik Vanuatu. *Jurnal Peperangan Asimetris, Agustus 2019, Volume 5, Nomor 2* , 42.

Putra, Y. M. (2017, December 7). *Festival Melanesia Nusantara Siap Digelar 2018*. Retrieved September 28, 2020, from Republika: <https://republika.co.id/berita/komunitas/aksi-komunitas/17/12/04/p0eihy284-festival-melanesia-nusantara-siap-digelar-2018>

Rahmi, N. (2016, April 4). Mengubah Sampah Menjadi Indah. *Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* , pp. 14-15.

Rahmi, N. (2015, September 3). Saudara Melanesia Indonesia. *Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* , pp. 10-11.

Roziqi, M. A. (2020). Diplomasi Soft Power Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United Liberation Movement for West Papua. *Journal of International Relations Vol. 6 No. 2* , 189-198.

Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XI, No. 1* , 96-97.

Safitri, E. (2019, September 30). *Dikunjungi Eks Menhan Fiji, Wiranto Bicara Soal Kedaulatan Papua*. Retrieved July 3, 2020, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4727146/dikunjungi-eks-menhan-fiji-wiranto-bicara-soal-kedaulatan-papua>

Septiari, D. (2019, September 30). *Vanuatu 'sponsoring separatism': RI*. Retrieved July 28, 2020, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/30/vanuatu-sponsoring-separatism-ri.html>

Shihab, M. (2016, May 15). *Kemenlu Ajak Pelajar Internasional Belajar Seni dan Budaya Indonesia*. Retrieved October 4, 2020, from Good News From Indonesia: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/05/15/kemenlu-ajak-pelajar-internasional-belaja-seni-dan-budaya-indonesia>

Sucipto, T. I. (2019, May 19). *Medco.id*. Retrieved July 18, 2020, from Partisipasi Pemilih di Papua Barat Capai 90 Persen: <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/Wb7LIXdk-partisipasi-pemilih-di-papua-barat-capai-90-persen>

Suhartono. (2015, May 10). *Presiden Jokowi: Mulai Hari Ini, Wartawan Asing Bebas ke Papua*. Retrieved July 14, 2020, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/10/13255801/Presiden.Jokowi.Mulai.Hari.Ini.Wartawan.Asing.Bebas.ke.Papua>

Susetyo. (2008, December 18). *Bappenas*. Retrieved from Bappenas: [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20\(18%20Desember%202008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20(18%20Desember%202008).pdf)

Tan, C. (2015, July 16). *#TalkAboutIt: Five key things to know about West Papua*. Retrieved July 3, 2020, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2015-07-16/five-key-things-to-know-about-west-papua/6625096>

Tebay, N. (2015, March 5). *Addressing the Papua issue in the Pacific*. Retrieved July 3, 2020, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2015/03/05/addressing-papua-issue-pacific.html>

The Fijian Government. (2010, December 12). *Ratu Inoke meets Indonesian counterpart*. Retrieved October 16, 2020, from The Fijian Government: <https://www.fiji.gov.fj/Media-Centre/News/Ratu-Inoke-meets-Indonesian-counterpart>

Thompson, P. (2018, February 2). *Tuvalu and Nauru back Indonesia in Papua*. Retrieved August 2, 2020, from RNZ: <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/349483/tuvalu-and-nauru-back-indonesia-in-papua>

Universitas Soedirman. (2020, July 20). *Darmasiswa Testimony by Erika*. Retrieved October 2, 2020, from Universitas Soedirman: <http://bipa.iro.unsoed.ac.id/2020/07/27/darmasiswa-testimony-by-erika/>

Walsh, P. M. (2016, November 5). *The Pacific is divided on West Papua*. Retrieved July 16, 2020, from East Asia Forum: <https://www.eastasiaforum.org/2016/11/05/the-pacific-is-divided-on-west-papua/>

Webb-Gannon, J. E. (2014). *MSG Headache, West Papuan Heartache? Indonesia's Melanesian Foray*. *The Asia-Pacific Journal, Vol. 12, Issue 46, No 3*, 3.

Wijaya, S., & Wayne, H. (2018, June 14). *Bertambah Lagi Sekolah di Papua Nugini Ajarkan Bahasa Indonesia*. Retrieved October 2, 2020, from ABC News: <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-06-14/bertambah-lagi-sekolah-di-papua-nugini-ajarkan-bahasa-indonesia/9870480>

Wulandari, E. (2017, December 6). *Kisah Empat Warga Solomon Islands Di Maluku Tenggara*. *Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, p. 3.

